

TABLOID Sinar Tani

P E R T A N I A N

S I A B A R U

Edisi 13 - 19 April 2022

No. 3938

Tahun LII



e-mail : sintani@cbn.net.id
redaksi@tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 087881605773
TERBIT SETIAP HARI RABU

Scan to visit our website :
www.tabloidsinartani.com

12 Kian Menarik, Petani Kejar
KUR Taksi Alsintan

5 Taman Sains Pertanian Banjarbaru
Agroeduwisata Lahan Rawa Lebak

Febrika,
Inspirator
Petani
Milenial dari
Sambas



16

PERPRES NO. 35 TAHUN 2022 Momentum Kebangkitan Penyuluh Jilid Dua

Dapatkan E-paper Tabloid Sinar Tani dengan mendownload aplikasi Sinar Tani - Wikitani



Info Berlangganan SMS/WA : 0813 1757 5066



Padi Sehat, Hasilnya Mantap

FMC An Agricultural
Sciences Company

fmcindonesia_

fmc.indonesia

www.fmc.com

EDITORIAL

Satminkal Penyuluhan, Perlu Komitmen Pemda

Sahabat Tabloid Sinar Tani yang budiman, dalam beberapa terbitan ke depan kita disemarakkan oleh berita tentang penyuluhan, khususnya dengan terbitnya Peraturan Presiden No 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. Menurut Menteri Pertanian Perpres ini akan menguatkan kembali fungsi penyuluhan pertanian, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Untuk diketahui, penyuluhan pertanian ini sekarang ada dalam penanganan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu tepat sekali percepatan implementasi Perpres ini melibatkan kerja bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Rumah bagi penyuluhan di daerah sekarang cenderung kecil dan tidak mendapat anggaran yang memadai, bahkan tidak mendapat prioritas, sementara pekerjaan penyuluh menjadi lebih kompleks mencakup berbagai aspek baru. Sosialisasi Perpres 35/2022 sedang terus dilakukan Kementerian Pertanian dengan mendapat dukungan berbagai pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal menambahkan pada acara sosialisasi tersebut bahwa Perpres ini memberi pesan penting pada menteri, gubernur, bupati/walikota untuk penguatan hubungan kerja, dengan pembentukan Satminkal di provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian. Dengan demikian koordinasi dalam aspek penyuluhan bisa dibangun lebih erat antar berbagai tingkatan.

Ada dampak psikologis penting dengan posisi struktural lembaga penyuluhan yang kecil di daerah karena terkait dengan pengambilan keputusan, prioritas program dan anggaran. Posisi suara penyuluh sangat kecil sehingga tidak mempunyai kekuatan dalam penentuan kebijakan penyuluhan di daerah. Oleh karena pembentukan Satminkal menjadi sangat penting dan aturan yang terkait dengan implementasi Perpres tersebut dapat segera direalisasikan. Di sinilah Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran dalam turut memberi andil dalam mendorong terbentuknya Satminkal yang akan memperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah.

Pertanian rakyat, terutama pangan di Indonesia adalah usahat kecil, tetapi fokus penyuluhan saat ini sudah jauh berbeda. Teknologi berubah dan tuntutan masyarakat berkembang. Persaingan antar usaha, antar komoditas, antar sektor dan gempuran dari pasar global semakin kuat. Demikian juga kondisi agroekosistem mengalami perubahan.

Pendekatannya juga berubah secara gradual dari pola *top-down* ke pola *bottom-up*. Oleh karena itu program penyuluhan sejatinya beragam antar daerah, sesuai dengan agro ekosistem, potensi, prioritas dan kepentingan daerah dan petani. Itulah maknanya penyuluhan pertanian diserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tentu saja dengan mengaktifkan seluruh mesin penggerak dan kelembagaan pendukungnya mulai dari tingkat paling bawah sampai dengan pusat. Sasaran akhir tentu saja pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sinar Tani

Bung Kontak



Presiden Jokowi terbitkan Perpres Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian

- Kesempatan penyuluh pertanian bangkit lagi

Harga cabai dan bawang merah bergerak naik

- Biasa tamu tahunan saat Puasa dan Lebaran

BPS catat harga gabah mulai turun

- Panen telah tiba



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: BDPKPS

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Redaksi** : Yulianto; **Pemimpin Perusahaan** : Ir. Mulyono Machmur, MS; **Redaktur Pelaksana** : Yulianto; **Redaktur** : Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi** : Julian Ahmad; Nattasya; Iqbal; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden** : Ibnu Abas (Kaltara), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman** : Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter** : Rori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi** : Hamdani; **Pengembangan Bisnis** : - ; Iqbal Husein, SE; Indri; Ika; Echa Sinaga, Dewi Ratnawati; **Keuangan** : Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi** : Saptian Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit : PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris Utama** : Soedjai Kartasasmita; **Komisaris** : DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama : DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur** : Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email : sintani@cbn.net.id, redaksi@tabloidsinartani.com; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak** : Laksus Pangkopkamitbda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga** : Rp. 13.500 per edisi; **Tarif Iklan** : FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran** : Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.00096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN** : 0852-8586;
Percetakan : PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Informasi Sinar Tani dapat diakses melalui: www.tabloidsinartani.com

MENTAN MENYAPA



Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian RI



Implementasikan Perpres No. 35 Tahun 2022

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan tangguh (sehat, cerdas, aktif, dan produktif).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengingatkan kembali arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan yang aman, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya, melalui pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, cadangan pangan pokok, dan distribusi pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pembangunan pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam ketahanan dan ketersediaan pangan. Berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan harga pangan, yakni dengan menggenjot peningkatan produksi dan produktivitas, pengaturan distribusi, keamanan, serta kualitas pangan yang memiliki nilai tambah serta daya saing.

Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas dibutuhkan penguatan sumber daya manusia pertanian dan penerapan teknologi pertanian tepat guna, efektif, serta efisien yang dilakukan melalui penyuluhan pertanian yang inovatif.

Penyuluhan pertanian sebagai jembatan untuk mendiseminasikan inovasi teknologi hasil penelitian kepada petani, serta memberdayakan petani dan keluarganya agar mampu menerapkan konsep agribisnis secara utuh yang selaras dengan potensi wilayahnya dan memperhatikan kelestarian alamnya. Selain itu, penyuluhan pertanian mempunyai peran dalam penguatan kapasitas kelembagaan petani menjadi korporasi berbasis kawasan.

Saat ini, sebagaimana kita ketahui penyuluhan pertanian masih dihadapi berbagai persoalan sehingga belum sepenuhnya berfungsi untuk mampu memberikan dukungan yang kuat dalam pencapaian ketahanan pangan nasional sehingga dipandang perlu adanya penguatan fungsi penyuluhan pertanian.

Melihat kondisi tersebut dan perhatian yang begitu besar terhadap penyuluhan pertanian, maka Bapak Presiden RI telah menerbitkan peraturan melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Bapak Presiden RI menekankan penguatan fungsi penyuluhan pertanian dapat dilakukan melalui: (a) Penguatan Hubungan Kerja; (b) Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); (c) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian; (d) Materi Penyuluhan Pertanian; (e) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; (f) Jaminan Ketersediaan Prasarana dan Sarana; (g) Pembinaan dan Pengawasan

Melalui Sosialisasi Perpres ini saya berharap semua Kepala Daerah dapat mengimplementasikan peningkatan fungsi penyuluhan pertanian di tingkat lapangan dan semakin memperkuat sinergitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara Pusat dan Pemerintah Daerah agar upaya kita dalam mewujudkan ketersediaan dan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani dapat tercapai dengan baik.

Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Pertanian bisa melalui SMS ke: **087881605773** atau email ke: sintani@cbn.net.id atau redaksi@tabloidsinartani.com Jangan lupa sertakan nama dan alamat anda.

Penumbuhan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Lokasi SIMURP

Keikutsertaan perempuan dalam kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sangat penting untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan pertanian. Mereka terlibat secara langsung dalam usaha-usaha peningkatan hasil pertanian, seperti menjadi bagian dari motivator dalam adopsi dan pengenalan teknologi pertanian.



Kelompok Wanita Tani (KWT) di lokasi Program *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) merupakan wadah yang memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut andil dalam memajukan sektor agribisnis. Penumbuhan dan pengembangan KWT dilakukan melalui pemberdayaan wanita tani, dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal untuk meningkatkan usaha di bidang agribisnis dan kemampuan KWT dalam melaksanakan fungsinya sebagai dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan wanita tani.

Manfaat sosial yang diberikan oleh KWT tidak hanya mempengaruhi anggotanya sendiri tetapi juga keluarga dan komunitas mereka. Hasil kajian menemukan bahwa dengan terbentuknya KWT menyebabkan seluruh data lokasi kegiatan telah menjadi tempat yang menyenangkan. KWT memiliki kemampuan untuk melewati batasan sosial yang

kadang-kadang menghalangi perempuan yang berasal dari golongan sosial kurang mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa. Kelembagaan KWT juga memberikan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan dari berbagai kalangan komunitas desa sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.

Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) sudah memfasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian kepada 76 KWT di 8 provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Sulsel dan NTB) lokasi SIMURP, dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. KWT di lokasi SIMURP merupakan kelembagaan pemberdayaan wanita petani dalam pembinaannya diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian yang dapat menambah penghasilan keluarga di lokasi

SIMURP. Hasil kegiatan fasilitasi ini sudah banyak memberikan manfaat bagi anggota KWT dalam meningkatkan pengolahan hasil pertanian menjadi produk makanan seperti keripik pisang, ubi, saos cabai dan produk industri rumah tangga lainnya.

Salah satu contoh KWT di lokasi Program SIMURP yang sudah berjalan adalah "KWT RESTU IBU", di Desa Pejanggih Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang telah memulai usaha berupa produksi pembuatan opak berbahan Ubi Kayu. Pada tahap awal dengan menggunakan alat dan mesin bantuan dari kegiatan SIMURP 2021 telah memproduksi opak mentah dengan biaya produksi Rp 150 ribu per karung dengan harga jual Rp 400 ribu perkarung.

Pemberdayaan KWT

Dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitas kaum perempuan dalam meningkatkan program kelompok dan usahatani agribisnis, KWT menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok Wanita Tani juga sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat petani yang sepenuhnya dikelola oleh kaum perempuan (istri petani) yang bergerak dalam bidang pertanian dan usahatani agribisnis, yang memiliki fungsi untuk menciptakan kesejahteraan petani.

Tumbuhnya Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. KWT ini wilayah kerjanya tidak

melampaui batas administrasi desa. Untuk mengembangkan, dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, perlu pembinaan peran kelompok tani sebagai wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.

Sekaligus sebagai tempat untuk memperkuat Kerjasama dengan kelompok Tani, baik di antara sesama Petani dalam Kelompok Tani maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan. Bahkan menjadi Unit Produksi untuk menjaga kontinuitas, kuantitas, dan kualitas usaha tani dapat dikembangkan melalui masing-masing anggota kelompok tani untuk mencapai skala ekonomi.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkadang terdapat permasalahan kritis yang dihadapi oleh KWT, diantaranya hasil pengolahan KWT belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan anggota. Permasalahan umum yaitu akses permodalan dan pengelolaan manajemen usaha KWT masih sederhana dan menjadi kendala sampai saat ini. Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan KWT, maka diperlukan strategi seperti akses permodalan (perbankan), manajemen organisasi, kualitas produksi, administrasi keuangan dan pemasaran hasil produksi agar usahanya dapat lebih berkembang dan berkelanjutan.

Penulis : Suwarna
Penyuluh
Pertanian,
Pusluhan-
BPPSDMP



Sampaikan Pendapat, Kritik, Saran dan Dukungan Anda tentang Pembangunan Pertanian melalui **WA, SMS ke: 087881605773** atau email ke: **sintani@cbn.net.id**. Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda. SMS terpilih akan dimuat pada **WA** atau **SMS Cangkul**.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh, Selamat Pagi, Sahabatku, Memberikan yang Terbaik.

Apapun bentuk kehidupan yang dihadapi, berikan diri anda yang terbaik setiap hari.

Dalam menjalani kehidupan, sudah selayaknya kita senantiasa memberikan yang terbaik setiap harinya. Sebab ingatlah hidup itu sekarang dan saat ini.

Ketika kita mampu memberikan kehidupan yang maksimal setiap harinya, maka kehidupan itu akan

memberikan yang terbaik untuk kita. **(Hamzah Junaid)**

NGABUBURIT ASYIIL....

Webinar : Pengurangan Sampah Dengan Biokonversi BSF Menuju TPA Bebas Sampah Organik

Sabtu, 16 April 2022

Jam 15.30 -17.45 wib

Kerja sama Paguyuban Pegiat Maggot - BSF bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengantar : Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc (Direktur Pengurangan Sampah-Ditjen PSLB3-KLHK)

Narsum 1 : Arky Gilang Wahab (Greenprosa-Koordinator PPM Jateng. Metode Biokonversi BSF MENUJU TPA NOL S.O.D (sampah organik dapur)

Narsum 2 : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti (Guru Besar Ilmu Nutrisi Ternak—IPB): Keunggulan Maggot BSF sebagai pakan ternak.

Moderator : Muhammad Ardhi Elmeidian (Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara)

Penanggap :

1. Dr. Ir. Anang Sudarna, Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pemulihan DAS Citarum—Pembina PPM Nusantara - Kadis LH Jabar

2013—2018

2. Dr. Imam B. Prasodjo , Sosiolog, Tokoh Nasional

3. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri, Guru Besar Pengelolaan Udara Dan Limbah TL-ITB

Nara hubung :

Totok HP +62 821-5099-2483
Bobby +62 856-9507-0004
email : ppm.bsf@gmail.com
Facebook Fan Page : ppm.bsf
IG : ppm.bsf
Youtube : ppm bsf
(Ardhie Elmeidian)

Bahayakah LSD pada Sapi?



Beberapa waktu lalu dunia peternakan Indonesia dikagetkan dengan ditemukan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sapi di Provinsi Riau. Penyakit ini terbilang baru di Indonesia. Banyak pertanyaan terkait bahaya penyakit ini?

Seperti diketahui penyakit ini sebelumnya juga sempat menyerang ternak sapi di beberapa negara di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Diantaranya, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Guna mencegah penularan penyakit ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyampaikan siap mengerahkan SDM, baik dokter hewan maupun paramedik.

"Untuk penanganan LSD di Riau, kita akan kerahkan dokter hewan dan paramedik staf Kementan di Riau untuk membantu melakukan vaksinasi," kata Nasrullah.

Bahkan lanjut Nasrullah, pihaknya juga telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan masuknya penyakit LSD ini ke Indonesia. Upaya kewaspadaan tersebut telah dilakukan sejak penyakit ini masuk ke Asia Tenggara sejak tahun 2019.

Nasrullah pun meminta kepada semua peternak dan juga dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan, baik di kabupaten maupun provinsi agar segera melakukan pembatasan lalu lintas ternak untuk pencegahan penyebarluasan penyakit LSD ini.

Sementara itu, Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan, PHK menyatakan,

pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran kewaspadaan penyakit LSD kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia sebanyak 4 kali sejak itu.

"Kita gencarkan juga sosialisasi tentang LSD melalui berbagai media serta webinar berseri tentang kesiapsiagaan terhadap LSD pada tahun 2021," tutur Nuryani. Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut, menurutnya, membuat petugas di lapang dapat mendeteksi secara cepat kejadian LSD, melaporkan dan menanganinya.

"Sistem kita telah berhasil mendeteksi dengan cepat, hal ini didukung dengan sistem pelaporan *real-time* iSIKHNAS dan kemampuan laboratorium kesehatan hewan yang baik, sehingga penyakit dapat dikonfirmasi dengan segera," tambahnya.

Bahkan lanjut Nuryani, timnya akan gerak cepat melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari LSD ini. Strategi utama adalah vaksinasi, namun harus didukung deteksi dini dan penelusuran kasus, pengendalian lalu lintas, pengendalian vektor, serta komunikasi, informasi dan edukasi.

Nuryani mengakui, penanganan LSD ini akan menantang. Selain dapat disebarkan lalu lintas sapi tertular dan produknya yang mengandung virus, LSD dapat juga ditularkan melalui perantara mekanik seperti gigitan serangga.

Tak Menular

Meski mudah menyebar, namun pihak Kementerian Pertanian memastikan penyakit LSD (Kulit Berbenjol) pada sapi yang tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. "Penyakit ini tidak menular dari hewan ke manusia, atau bukan penyakit zoonosis," katanya.

Menurut Nasrullah, sapi atau kerbau yang tertular LSD dan kemudian telah sembuh, produknya seperti daging masih dapat dikonsumsi setelah dihilangkan bagian-bagian yang terdampaknya. "Pastikan daging yang akan dikonsumsi berasal dari rumah potong hewan yang diawasi oleh dokter hewan," tambahnya.

Nasrullah menegaskan, daging yang dijual di masyarakat, selama memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau berasal dari rumah potong hewan yang memiliki NKV, maka sapi tersebut dipastikan telah diperiksa kesehatannya sebelum dipotong dan setelah dipotong.

Karena itu Nasrullah menegaskan, LSD tidak menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau ragu membeli dan mengonsumsi daging sapi/kerbau.

Ia juga meminta kepada masyarakat agar hewan yang masih sakit untuk tidak dijual, dilalulintaskan, atau dipotong. Namun masyarakat tidak perlu panik dan terus mendukung berbagai upaya

penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah. "Kita telah siapkan sumberdaya yang cukup untuk penanganan LSD ini," katanya.

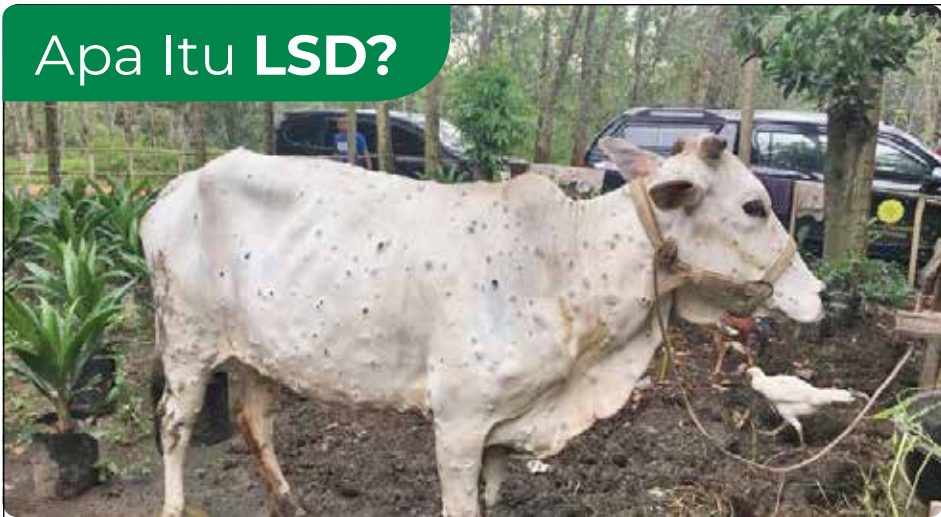
Sementara itu, Nuryani mengungkapkan, perkembangan penanganan LSD di Riau pasca penetapan wabah, saat ini kasus LSD telah terkonfirmasi di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan upaya pemberantasan intensif terus dilakukan. "Kami tengah mempersiapkan vaksinasi massal LSD di Riau. Vaksinnnya sudah kita siapkan," ujarnya.

Nuryani menyampaikan, sebanyak 147 orang petugas kesehatan hewan yang terdiri dari dokter hewan dan paramedis sudah siap diterjunkan melakukan vaksinasi setelah mendapatkan pelatihan dari tim pusat. "Kita juga siapkan program sosialisasi kepada semua tingkatan pemangku kepentingan untuk mendukung program ini," ungkapnya.

Nuryani menambahkan bahwa selain dengan dukungan APBN dan APBD, pengendalian LSD di Riau juga mendapatkan dukungan dari program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) dan Global Health Security Program Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

"Dukungan dari Pemda dan mitra kerjasama ini sangat penting untuk melaksanakan tindakan darurat di lapang. Semoga LSD di Riau dapat segera kita redakan dan tidak menyebar ke wilayah lainnya," katanya. **Eko/Yul**

Apa Itu LSD?



LSD merupakan penyakit yang disebabkan virus dari family Poxviridae. Sapi yang terkena penyakit ini

akan mengalami kerusakan pada kulit. Bahkan bisa menyebabkan kematian akibat infeksi sekunder pada ruminansi spesifik yaitu

sapi dan kerbau.

Vektor mekanik pembawa virus penyakit ini adalah serangga penghisap darah, seperti nyamuk dan lalat, sehingga rentan berdampak pada peternak rakyat. Jika ternak sapi terkena penyakit ini akan menyebabkan kerugian ekonomi. Diantaranya terjadi penurunan produksi susu dan dapat menyebabkan gangguan reproduksi pada sapi jantan maupun betina.

Secara historis LSD pertama kali muncul di Afrika pada tahun 1929. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Sistem Informasi Kesehatan Dunia (WAHIS-OIE), penyakit LSD yang merupakan salah satu penyakit wajib lapor

OIE kini telah menyebar di Asia.

Kasus yang semula dilaporkan di China dan India pada tahun 2019, serta Bhutan dan Vietnam tahun 2020, kini telah menyebar ke Thailand pada Maret 2021. Laporan terakhir pada Juni 2021 terjadi wabah di Kamboja dan Malaysia.

Hingga akhir 2021, penyakit ini belum pernah dilaporkan di Indonesia. Namun kabar mengejutkan terjadi pada Maret 2022, penyakit ini menyerang sapi di Riau. Karena itu, perlu kewaspadaan dini terhadap penyakit ini agar jangan sampai menyebar ke seluruh Indonesia. **Yul**

Taman Sains Pertanian Banjarbaru

Agroeduwisata Lahan Rawa Lebak

Lahan rawa merupakan salah satu lahan sub optimal yang sangat potensial dalam mendukung ketahanan pangan, baik untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Lahan ini mempunyai keunggulan spesifik karena dapat menghasilkan padi saat musim kemarau. Ketika agroekosistem lainnya sawah irigasi dan tadah hujan mengalami kekeringan.



Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah membangun lima TSP (Taman Sains Pertanian) di tingkat provinsi dan 16 TTP (Taman Teknologi Pertanian) di tingkat kabupaten/kota. Salah satu TSP berada di Kebun Percobaan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) sebagai wakil atau *miniature* dari agroekosistem rawa (lahan rawa lebak).

Taman sains ini merupakan unit percontohan berskala pengembangan, berwawasan agribisnis hulu-hilir, bersifat holistik dan komprehensif yang didalamnya ada berbagai inovasi dan teknologi unggul pertanian berbasis lahan rawa. Di taman sains ini ditampilkan teknologi penataan lahan, teknologi konservasi dan efisiensi pemanfaatan air, teknologi pengelolaan limbah pertanian dan teknologi pelestarian tanaman eksotik rawa.

TSP Lahan Rawa merupakan salah satu wahana gelar teknologi pertanian modern. Bahkan dapat menjadi media diseminasi dan komunikasi berbagai *stake holder* yang berminat dalam pengembangan pertanian. Termasuk, tempat magang, serta lokasi penelitian.

Lokasi TSP lahan rawa terletak di Kebun Percobaan Balittra Banjarbaru, berada

tepat di belakang kantor Balittra Banjarbaru. Tepatnya, di Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Katamadya Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Letak TSP Banjarbaru sangat strategis karena terletak di pusat kota dan jarak tempuh dengan bandara sekitar 10 menit (7 km).

TSP Lahan Rawa seluas 39 ha ini memiliki nuansa sebagai sumber inovasi teknologi yang ada. Secara makro desain pembangunan TSP tersebut meliputi penataan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, penataan lahan termasuk dengan sistem surjan untuk berbagai komoditas tanaman.

Penataan letak instalasi pengolahan limbah dan kandang ternak terintegrasi dengan sumber pakan ternak. Saung dan kolam yang estetika terletak di tengah-tengah kawasan dilengkapi dengan menara pantau yang serasi.

Dalam penataan lahan di lokasi TSP Banjarbaru memperhatikan nilai fungsi dan estetika. Meliputi, penataan kawasan produksi berbagai komoditas (tanaman padi, palawija, hortikultura, ternak sapi dan kambing), pengembangan teknologi dan riset. Di TSP juga terdapat kawasan wisata dan display (show window) teknologi, serta sarana/infrastruktur utama maupun pendukung.

Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan yang dikembangkan di TSP Banjarbaru berdasarkan hasil analisis usaha tani yang paling menguntungkan, kebutuhan pasar serta teknologi pendukung komoditas yang dihasilkan Balai Penelitian Lahan Rawa serta Balai di Litbang Pertanian lainnya. Selain komoditas unggulan juga diusahakan komoditas pendukung program diversifikasi.

Plasma nutfah padi merupakan sumber keanekaragaman karakter padi yang merupakan sumber keunggulan tetua dalam perakitan varietas unggul baru. Keragaman plasma nutfah padi berupa koleksi varietas lokal, ras-ras yang adaptif di lingkungan spesifik, kultivar unggul yang lama dilepas, tetapi masih bertahan di masyarakat.

Sampai kini telah diidentifikasi sebanyak 136 aksesori padi asal Kalimantan dan Sumatera. Sampai tahun 2015 terdapat sekitar 11 varietas padi rawa (Inpara) dengan tingkat adaptasi yang berbeda-beda.

Sebagian areal pesawahan, TSP Lahan Rawa ini dapat menjadi

menarik, disertai rasa daging buah yang asam-manis.

Ketiga, kerabat srikaya (*Anona spp*), yang mempunyai ukuran buah lebih besar dari pada srikaya biasa. Keempat, kerabat mangga rawa (*Mangifera spp*) dan masih banyak jenis lainnya yang potensial. Sebagian besar merupakan tumbuhan liar tumbuh alami.

Buah-buah eksotik yang dibudidayakan di ruang TSP Lahan Rawa Banjarbaru terdapat sekitar delapan kerabat. Tujuan adanya ruang buah-buah eksotik dan padi lokal ini untuk menunjukkan potensi TSP Lahan Rawa, khususnya untuk pelestarian dan konservasi plasma nutfah dan sumber genetik tanaman secara *in situ*.

Minipolder yang sudah dibangun Balittra telah mengubah kondisi lingkungan rawa, bukan hanya tempat usaha pertanian dan perikanan, tapi juga rekreasi air bagi masyarakat. Teknologi inovatif pengelolaan air dan lahan dapat menjadi tempat belajar bagi petani, penyuluh, generasi muda dan pengunjung lainnya.

Keindahan menjadi pertimbangan dalam pengembangan demplot tata



areal pembelajaran bagi anak-anak untuk mengolah sawah dan menanam padi dalam kegiatan agroeduwisata. Fungsi lainnya menjadi areal pertanaman untuk konservasi plasma nutfah dan penyediaan benih sebar.

Beragam buah eksotik ditemukan di lahan rawa yang memiliki sifat yang khas dan spesifik. Pertama, kerabat durian liar (*Durio lowianus*), dengan sifat unggul resisten terhadap patogen *Phytophthora*, daging buah tebal, citarasa enak, dan aroma tidak menyengat.

Kedua, kerabat manggis liar (*Garcinia sp*), seperti manggis ganal yang mempunyai bentuk ukuran buah yang eksotis, daging buah berwarna putih dengan citarasa yang manis, buah munda mempunyai warna merah cerah

kelola air yang terintegrasi dengan agroeduwisata.

Penanaman bibit tanaman dilakukan dengan tetap memperhatikan estetika dan dilakukan secara bertahap mengikuti standar budaya tanaman.

Untuk memperindah lokasi pertanaman, di TSP Lahan Rawa juga di budidayakan tanaman refugia dan tanaman hias yang adaptif dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mewujudkan TSP sebagai wahana yang dapat dikunjungi khalayak umum, telah dilengkapi sarana pendukung yang terintegrasi dengan agroeduwisata. Misalnya, perahu, kereta air dan swafoto site.

Jika sempat berkunjung ke Banjarbaru jangan lupa mampir ke TSP lahan rawa. **Ani Susilawati/Dedi Nursyamsi/Yul**



Padi Hibrida MAPAN P-05, Hasil Beras Kualitas Super dan Melimpah

Benih padi hibrida kini banyak dipilih petani karena potensi hasil yang lebih tinggi daripada padi inbrida. MAPAN P-05 dari PT Primasid Andalan Utama adalah salah satu benih padi hibrida yang unggul dan bermutu yang telah ditanam oleh petani di sebagian besar wilayah Indonesia.

Siswanto, petani dari dusun Dampit, desa Sumberharjo, kecamatan Eromoko, kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah panen padi pada Kamis (17/3/2022). Varietas benih padi hibrida yang ditanamnya adalah MAPAN P-05, di lahan tadah hujan seluas 6000 meter persegi.

"Sudah 9 tahun saya selalu menggunakan benih padi hibrida MAPAN P-05 ini. Hasil meningkat 30 – 40 persen, dan musim tahun 2022 ini panen dengan hasil yang terbaik. Saya memperoleh 10 ton GKP (Gabah Kering Panen)," katanya.

Hasil panen raya dengan Dinas Pertanian setempat dilakukan ubinan 2,5 x 2,5 meter diperoleh hasil 8,15 kg atau setara dengan 13,04 ton/ha. Kemudian setelah dilakukan pengubinan padi dipotong dengan menggunakan *combine harvester* dengan hasil 6.028 kg atau setara

dengan 10 ton GKP.

"Petani sekitar sangat tertarik menanam MAPAN P-05 sebab hasilnya meningkat signifikan dari 40 karung, setelah tanam MAPAN P-05 mendapatkan hasil 55 karung, ada kenaikan 15 karung. Beras yang dihasilkan berkualitas super, pulen, dan melimpah. Benih MAPAN P-05 menjadi pilihan utama petani di sini," tutur Siswanto.

Peliharaan tanaman padi yang menggunakan benih hibrida MAPAN P-05 ini pun cukup mudah, terpenting menggunakan pupuk kandang. Siswanto bahkan dapat mengurangi penggunaan



pupuk N dan tidak menggunakan pupuk urea. Pupuk disesuaikan dengan tingkat kesuburan masing-masing kondisi tanah.

Dari 6000 meter persegi lahannya, untuk lahan per 1000 meter persegi, Siswanto menggunakan benih padi MAPAN P-05 sebanyak 6 kg, umur tanam benih 18 HSS, dan umur panennya 103 HST (total umur 121 HSS).

Pemupukan yang dilakukan Siswanto yaitu pupuk dasar umur 1 hari sebelum tanam dosis TSP 100, ZA 75, pupuk susulan 1 yaitu umur 15 HST dosis Phoska 100, pupuk susulan 2 dilakukan pada umur 30 HST dosis Phoska 100, dan pupuk susulan 3 pada umur 45 HST dosis Phoska 100. Total pupuk ZA 75 kg, TSP 100 kg, Phoska 300 kg.

Lahan tadah hujan milik Siswanto pada musim tanam pertama yaitu padi, kemudian musim tanam kedua tembakau, atau melon, atau jagung. ■

PUPUK ORGANIK CAIR

EM4TM
EFFECTIVE MICROORGANISMS 4

**HEMAT BIAYA
PANEN BERLIPAT
GANDA**

**TEKNOLOGI FERMENTASI
BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:**

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fiksasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.

**Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA**

KANTOR PEMASARAN :
JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH : Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR : Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail : slpjatim@em4-indonesia.com
BALI : Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

Web: www.em4-indonesia.com
Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

EM
EMRO

L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Kadar Hara Pupuk
C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
N = 0,07 % ; P₂O₅ = 3,22 ppm ;
K₂O = 7675,0 ppm ; Ca = 1676,25 ;
Mg = 597,0 ppm ; B < 20 ppm ;
Cu < 0,01 ppm ; Mn = 3,29 ppm ;
Fe = 5,54 ppm ; Zn = 1,90 ppm ;

Mikroba:
Lactobacillus = 8,7 x 10⁵ sel/ml ;
Pelarut Fosfat = 7,5 x 10⁶ sel/ml ;
Yeast/Khamir = 8,5 x 10⁶ sel/ml ;

AGRITIPS

Makan Pepaya Selama Puasa

Banyak pakar kesehatan yang menyarankan kita makan buah setiap hari, termasuk selama menjalankan ibadah puasa. Makan buah bisa jadi pilihan menu makanan terbaik saat berbuka puasa maupun sahur.

Buah-buahan memberikan nutrisi penting untuk kesehatan dan pemeliharaan tubuh. Buah merupakan sumber nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh, mulai dari potasium, serat, vitamin C, dan folat. Dimana semua kandungannya itu tentu sangat baik bagi tubuh, salah satunya buah pepaya.

Saat menjalankan puasa, tubuh membutuhkan banyak asupan nutrisi lebih. Manfaat yang baik bagi kesehatan tersebut didapat dari kandungan nutrisi pepaya. Dengan banyaknya kandungan air dan serat di dalam pepaya, tak heran jika ternyata mengkonsumsi buah ini membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, pepaya juga mengandung banyak enzim yang membantu memecah makanan dan melindungi jaringan yang



melapisi saluran pencernaan.

Pepaya juga merupakan salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi penderita diabetes.

Meskipun buah tropis ini terkenal dengan rasa manisnya, buah ini sangat bagus untuk penderita diabetes atau ingin mengurangi risiko terkena diabetes. Manisnya alami dan tidak seperti buah-buahan lainnya, ia memiliki kandungan gula yang rendah serta kadar glukosa yang rendah. Sifatnya yang mengenyangkan memastikan pikiran dan tubuh yang kenyang, dan dalam jangka panjang, menghentikan Anda dari mengidam makanan yang bisa berbahaya bagi pasien diabetes.

Pepaya mengandung banyak antioksidan dan fitokimia yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko serangan jantung. Tidak hanya itu, kandungan vitamin C, serat, dan potasium meningkatkan aliran darah yang sehat dan menjaga arteri tetap sehat.

Nattasya/Gsh



Perpres No. 35 Tahun 2022 Momentum Kebangkitan Penyuluh Jilid Dua

Kehadiran UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) membangkitkan semangat penyuluh di daerah. Namun semangat itu pun pelan-pelan redup dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Untuk membangkitkan kembali semangat garda terdepan pembangunan pertanian, Presiden Joko Widodo 4 Maret 2022 lalu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. Seperti apa Perpres tersebut?

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap dengan hadirnya Perpres tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa bekerja sama dalam menghadirkan pertanian yang maju, modern dan mandiri. Untuk itu sosialisasi Perpres No. 35 Tahun 2022 menjadi sangat penting karena berkaitan dengan fungsi penyuluh pertanian.

"Kalau bicara mengenai penyuluh pertanian dalam Perpres ini berkaitan dengan penguatan hubungan bagaimana koordinasi bisa dilakukan dengan baik," katanya saat memberikan arahan kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) bertema Sosialisasi Perpres No. 35 Tahun 2022 di Jakarta, Jumat (1/4).

Sementara itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi berharap dengan Perpres tersebut peran penyuluh pertanian bisa bangkit kembali, bahkan melejit. Dengan bangkitnya peran penyuluh akan diikuti peningkatan produktivitas tanaman.

Dedi mengakui, terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan SP3K, peran penyuluh di daerah sangat terasa. Terlihat dengan berdirinya Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) di pusat dan daerah, BP3K dan dan BP4K.

"Penyuluh sangat efektif dan nyaring bunyinya, apalagi didukung Komisi Penyuluhan, baik di provinsi dan kabupaten," ujarnya saat Ngobras (Ngobrol Asik): Yuk Kenali Perpres No. 35 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (5/4).

Namun lahirnya UU No. 23 Tahun 2014, Dedi menyayangkan, rumah penyuluhan yang sudah dibangun harus lenyap. Kelembagaan penyuluh di daerah ada yang berganti menjadi hanya kbid penyuluh, ada yang UPTD, bahkan sebagian hilang.

Karena itu dengan terbitnya Perpres, Dedi berharap akan terjalin sinergitas dan kemesraan antara pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten dan kota. Apalagi Perpres tersebut mengamanahkan wajib bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendirikan satminkal dengan membuat UPTD. "Sinergitas ini penting untuk efektifitas penyuluhan. Bagi penyuluh yang penting meraka ada rumahnya, baik di provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Pentingnya Peran Pemda

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, M.Si mengatakan, dalam implementasi Perpres peran kepala daerah dan aparat kewilayahan dalam penguatan fungsi penyuluh pertanian sangat penting.

Setidaknya ada tujuh peran gubernur. *Pertama*, menetapkan Satminkal di Dinas Provinsi jika tidak terdapat UPT Daerah. *Kedua*, mengusulkan kebutuhan penyuluh kepada menteri. *Ketiga*, peningkatan kapasitas penyuluh PNS dan PPPK (pendidikan, latihan dan sertifikasi kompetensi).

Keempat, peningkatan kompetensi bagi penyuluh swadaya. *Kelima*, sertifikasi kompetensi bagi penyuluh swasta. *Keenam*, memfasilitasi dan kerjasama fasilitasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian. *Ketujuh*, pembinaan dan pengawasan.

Sedangkan peran bupati atau walikota juga menetapkan Satminkal di Dinas Kabupaten/Kota. Itupun jika tidak terdapat UPT Daerah. Bupati/walikota juga bisa mengusulkan kebutuhan penyuluh kepada Menteri, membentuk dan menetapkan BPP pada setiap kecamatan potensi pertanian.

Peran lainnya adalah meningkatkan kapasitas penyuluh PNS dan PPPK (diklat, sertifikasi kompetensi), peningkatan kompetensi bagi penyuluh swadaya, sertifikasi kompetensi bagi penyuluh swasta. "Daerah juga harus mengkoordinasikan wilayah kerja penyuluh swasta, memfasilitasi dan kerjasama fasilitasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan

Ketua KPPN, Prof. Bustanul Arifin: Wajib Hukumnya Pemda Tetapkan Satminkal

Hadirnya Perpres No. 35 Tahun 2022

menjadi angin segar bagi penyuluh pertanian. Salah satu amanah Perpres tersebut adalah daerah wajib membentuk satminkal berbentuk UPTD.



Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Prof. Bustanul Arifin mengatakan, dalam pasal 3 disebutkan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat daerah (provinsi hingga kabupaten) dilakukan satuan administrasi pangkal (satminkal) setara eselon III. Bentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus membidangi penyuluhan pertanian di Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.

"Jika tidak ada, maka wajib hukumnya pemda menetapkan satminkal dan dikepalai Kbid dengan komando langsung Kadistan Provinsi dan Kabupaten. Jika sudah ada satminkal penyuluhan peternakan, penyuluhan perkebunan, penyuluhan pertanian, maka semua dilebur menjadi satu yakni Penyuluhan Pertanian," tuturnya.

Setelah Satminkal, dalam Perpres No. 35 Tahun 2022

ini juga menjelaskan penguatan kelembagaan penyuluh di tingkat kecamatan dilakukan dengan menghadirkan Balai Penyuluhan Pertanian (Pasal 10-13). Untuk itu, pembentukan dan

penetapan BPP dilakukan pada setiap kecamatan oleh Bupati/Walikota melalui Perbup atau Perwali.

"Tugas dan Fungsi BPP sendiri sudah diatur dalam UU 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Permentan No. 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian," tuturnya.

Nantinya BPP dipimpin penyuluh yang ditunjuk sebagai koordinator yang bertanggung jawab pada Kbid pada Satminkal Penyuluhan di Kabupaten/Kota. BPP juga berkoordinasi dengan camat untuk implementasi Kostratani. "Untuk operasionalnya, BPP menggunakan anggaran APBD (Kab/Kota), Kementan (APBN), kerjasama dengan pihak lain asal biayanya sah dan tidak mengikat," kata Bustanul. **Gsh/Yul**

pertanian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan," katanya.

Sementara itu peran camat atau arapat di tingkat kecamatan lanjut Safrizal adalah koordinasi dengan pendamping atau penyuluh pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani, khususnya dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan pertanian.

Peran aparat kecamatan juga mengkoordinasikan kepala desa untuk memberdayakan kekuatan kepemudaan, termasuk karang taruna untuk menjadi petani.

Selain itu juga, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara intensif dan real time berbasis data primer penyuluh pertanian.

Jadi dalam pembangunan pertanian kecamatan menjadi sebagai Centre of Gravity kewilayahan, khususnya dalam inovasi dan transformasi digital pertanian. Kecamatan nantinya sebagai simpul data dan informasi pembangunan pertanian. "Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama untuk Forum Koordinasi Pendamping dan Penyuluh," tegas Safrizal. **Gsh/Echa/Indri/Yul**

Geliat Penyuluh Kian Terasa

Perpres 35 Tahun 2022 hadir untuk menjawab dukungan kuat terhadap penyuluhan pertanian dalam pencapaian ketahanan pangan yang terdiri peningkatan ketersediaan, akses hingga kualitas konsumsi pangan. Harapannya geliat penyuluhan pertanian di Indonesia akan semakin terasa.



Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSPDM Pertanian, Bustanul Arifin Caya mengatakan, geliat tersebut akan terasa gerakannya di daerah seiring diwajibkannya pembentukan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) setara eselon III dan berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), khususnya membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.

"Satminkal ini menjadi wadah pengelolaan pembinaan dan pengembangan kompetensi Penyuluh," katanya saat acara Ngobras (Ngobrol Asik) Yuk Kenali Perpres No. 35 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (5/4).

Amanat pembentukan satminkal setara UPTD Penyuluhan Pertanian ini tertera pada Pasal 3 Perpres 35

Tahun 2022, khususnya Bab II Penguatan Hubungan Kerja. Jika di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat UPTD Penyuluhan Pertanian, maka Gubernur dan Walikota/Bupati wajib menetapkan satu satminkal di Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi serta Kabupaten/Kota dilakukan satminkal. Dampaknya, pengelolaan karir penyuluh (mulai administrasi, penilaian angka kredit penyuluh pertanian, uji kompetensi, kenaikan pangkat/jenjang jabatan fungsional, peningkatan uji kompetensi) berada pada satu unit kerja. "Adanya satminkal akan memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja penyuluh

pertanian," kata Bustanul.

Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, akan terjadi koordinasi dan mekanisme kerja yang teratur antara Pusat (Kementerian Pertanian), Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sementara Pusat memberikan arahan, provinsi melaksanakan koordinasi dan kab/kota sebagai pelaksana kegiatan melalui mekanisme kerja terintegrasi sesuai perencanaan, pembinaan, pengawalan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Pertanian.

BPP dan Posluhdes

Di tingkat Kecamatan hingga Desa, Bustanul mengungkapkan, Balai Penyuluhan Pertanian dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) menjadi wajib dibentuk serta ditumbuhkan sesuai amanat Pasal 10 Perpres No. 35 Tahun 2022. BPP dibentuk pada setiap kecamatan yang memiliki potensi pertanian. "Setidaknya tersedia lahan pertanian dan terdapat rumah tangga petani dan ditetapkan Bupati/Walikota," ujarnya.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, lanjut Bustanul, Kepala Dinas Kab/Kota menetapkan seorang penyuluh sebagai koordinator BPP. Koordinator BPP bertanggung jawab kepada kepala dinas kab/kota melalui Satminkal Penyuluhan Pertanian Kab/Kota. Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berkoordinasi dengan camat.

"Dulu, penetapan penyuluh

sebagai Koordinator BPP belum cukup tegas dan masih beragam. Sekarang, dengan adanya Perpres ini diharapkan penetapan penyuluh sebagai Koordinator BPP oleh kepala dinas kab/kota sudah tegas dan seragam. Sehingga, berdampak pada meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan," tuturnya.

Bustanul juga menyoroti, sebelum hadirnya Perpres 35/2022 ini, nomenklatur BPP di kecamatan sebagai lembaga penyuluhan pertanian belum seragam. Karena itu, sekarang diharapkan adanya kejelasan status wajib menumbuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, bisa memiliki nomenklatur yang sama. "Diharapkan, eksistensi BPP dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan semakin kuat," tambahnya.

Terkait materi penyuluhan pertanian, Bustanul mengatakan, materi penyuluhan pertanian belum sepenuhnya spesifik dan sesuai kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat pertanian. Namun pada Pasal 15 Perpres No. 35 Tahun 2022 diatur materi penyuluhan, Menteri menyediakan sumber materi penyuluhan berbasis TIK dan penekanan materi pada peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan kualitas konsumsi pangan.

"Diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat pertanian dalam pencapaian ketersediaan pangan, akses pangan, dan kualitas konsumsi pangan," harap Bustanul. **Gsh/Yul**

Kementan Siap Tindak Lanjut Perpres

Sebagai implementasi dari Perpres No. 35 Tahun 2022 agar bisa segera dilakukan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian menindaklanjuti beberapa poin penting dari Perpres tersebut. Mulai dari pengaturan hubungan kerja yang mengamanatkan pengaturan Satminkal, khususnya dalam pengelolaan karir penyuluh pertanian.

"Nantinya administrasi penilaian angka kredit, uji kompetensi, kenaikan pangkat, termasuk jenjang jabatan fungsional, dan peningkatan

kompetensi penyuluh ada di satminkal," katanya.

Tak hanya itu, operasionalisasi penyuluh seperti penyusunan kebijakan, rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian berada di satminkal. Termasuk juga, koordinasi dan komunikasi kegiatan dan anggaran, pendampingan kegiatan, identifikasi dan analisis laporan pelaksanaan perencanaan.

Dalam Pasal 14 ayat 10 diuraikan mengenai penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Untuk itu, Kementerian Pertanian

perlu mengatur mengenai pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya dan swasta.

Dimulai dengan identifikasi dan verifikasi petani/masyarakat yang memenuhi syarat penyuluh swadaya. Nantinya Bupati/Walikota yang melakukan pengukuhan penyuluh pertanian swadaya, koordinasi wilayah kerja, peningkatan kompetensi dan pembinaan teknis penyuluhan pertanian swadaya dan swasta.

Mengenai tata cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Pasal 20 ayat 4, Kementerian

Pertanian akan mengatur sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian, koordinasi dan penyediaan dengan pihak terkait dalam penguatan infrastruktur baik dari sisi komponen lunak, piranti lunak, dan penguatan jaringan.

Terkait pembinaan dan pengawasan, Bustanul cakupan pengaturannya melingkupi sasaran, mekanisme dan metode sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta penghargaan. Termasuk pemantauan, evaluasi dan pemeriksaan pelaksanaan penguatan fungsi penyuluhan pertanian. **Gsh/Yul**

Ketua Dewan Pembina Perhimpitan, Mulyono Machmur: Bangkitkan Semangat dan Kepercayaan Penyuluh



Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian. Terbitnya Perpres ini menjadi momen bangkitnya kembali penyuluh pertanian pasca terdegradasi UU No.23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah.

Ketua Dewan Pembina Perhimpitan, Mulyono Machmur berharap, kehadiran Perpres No. 35 Tahun 2022 ini menjadi momen kebangkitan penyuluh pertanian jilid kedua, setelah yang pertama adalah saat lahirnya UU. No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).

Namun demikian mantan Kepala Pusat Penyuluh Pertanian ini menyoroti beberapa hal dalam Perpres tersebut. Dalam pasal 1 ada dua point mendapat perhatian khusus. Pertama, definisi penyuluh pertanian. Kedua, operasionalisasi penyuluh pertanian.

Kemudian pasal 2 mengenai kebijakan dalam penguatan fungsi penyuluhan pertanian yang harus dilakukan beberapa kegiatan. Diantaranya, penguatan hubungan kerja, penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh.

Selain itu, penguatan melalui materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta jaminan ketersediaan prasarana dan sarana.

Sementara pasal 3 Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian di Provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Satminkal. Menurut Mulyono, Satminkal merupakan wadah pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kompetensi penyuluh.

Fungsi Satminkal dilaksanakan UPTD yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. Artinya menurut Mulyono, dalam Perpres, Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota diperintahkan segera membentuk UPTD Penyuluhan yang berperan sebagai koordinasi.

Dalam pasal 4 ditegaskan Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Satminkal Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. Ini menjadi salah satu syarat jika penyuluh pertanian bisa berjalan dengan baik.

"Satminkal jadi dapur dari koordinasi penyelenggaraan penyuluhan. Apalagi materi penyuluhan lebih ditekankan pada ketahanan pangan," kata Mulyono saat Ngobras (Ngobrol Asik): Yuk Kenali Perpres No. 35 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (5/4).

Kelembagaan yang Kuat

Dengan adanya kelembagaan penyuluh yang kuat, Mulyono yakin

akan mampu membangkitkan semangat dan menumbuhkan kepercayaan diri penyuluh pertanian. "Penyuluh juga akan mampu berkreasi, berinovasi dan berorganisasi. Kelembagaan penyuluh akan menjadi sumber informasi dalam pengembangan agribisnis dan tempat menumbuhkan kemandirian petani," katanya.

Hal lain yang menjadi titik berat dalam Perpres menurut Mulyono adalah Pasal 9 mengenai tata hubungan kerja yang mengamanatkan pembuatan Peraturan Menteri Pertanian. "Ini (Permentan,red) PR yang harus segera dilakukan agar penyuluh bisa langsung bekerja," tegasnya.

Dalam penyampaian materi penyuluhan pertanian yang terdapat dalam pasal 16, Mulyono juga menilai, metode konvensional berupa tatap muka masih penting. Pasalnya, penyuluh bukan sekadar menyampaikan inovasi teknologi, tapi bagaimana mengubah pola pikir petani.

"Kita harapkan ke depan bisa bentuk postur penyuluhan yang profesional yang tidak hanya mengandalkan hard skill tapi juga soft skill, sehingga bisa memberikan pelayanan prima ke petani," tuturnya.

Karena syarat minimal penyuluh

pertanian adalah mengetahui teknis pertanian, bisa mengajar, paham ilmu sosiologi pedesaan, tinggal di desa wilayah kerja dan memiliki pendidikan dasar penyuluh pertanian. Karena itu, dukungan DPR sangat penting untuk terciptanya postur penyuluh pertanian yang profesional.

Sebagai langkah ke depan pasca lahirnya Perpres No. 35 Tahun 2022, Mulyono mengatakan, ada lima hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, untuk penguatan hubungan kerja agar segera dibuat Permentan. Kedua, pelatihan administrasi dan manajemen penyuluh bagi pimpinan UPTD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Ketiga, koordinasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus. Keempat, dukungan pendanaan Penyuluhan Pertanian dari APBN dan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kelima, peran kepemimpinan formal (Gubernur, Bupati/Walikota) sangat menentukan dalam implementasi Perpres 35/2022. "Penyuluhan ke kepala daerah harus dilakukan secara masif. Dukungan DPR juga penting agar terbangun postur penyuluh pertanian yang profesional," tuturnya. **Yul**

Inilah Substansi Perpres No. 35 Tahun 2022

Ada beberapa substansi Perpres No. 35 Tahun 2022 yang cukup penting. Dari mulai hubungan kerja, penyelenggaraan, kelembagaan penyuluh di daerah, ketenagaan penyuluh, materi penyuluhan hingga sarana dan prasarana penyuluhan.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pertanian, Maha Matahari Eddy Purnomo mengatakan, dalam penguatan hubungan kerja dilakukan dengan sinergi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. "Nantinya sinergi melalui operasionalisasi penyuluhan pertanian oleh Menteri Pertanian," katanya.

Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi dan kab/kota menurut Eddy, dilaksanakan Satminkal yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan pembinaan dan pengembangan kompetensi Penyuluh. Satminkal dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.

"Bila tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menetapkan satu Satminkal Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/kota," tegasnya.

Substansi berikutnya adalah Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa. Setiap kecamatan yang berpotensi harus dibentuk BPP dan ditetapkan oleh bupati/walikota. "Kepala dinas menetapkan seorang penyuluh sebagai koordinator BPP dan dalam pelaksanaan fungsinya BPP berkoordinasi dengan camat," katanya.

Terkait dengan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes), ditetapkan kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat dan bupati/walikota. Perpres ini kata Eddy, merupakan penegasan adanya dukungan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes oleh pusat dan daerah.

Dalam Perpres ini juga terdapat substansi tentang penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh. Mulai dari penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh PNS dan penyuluh PPPK, pengembangan dan pembinaan teknis penyuluh swadaya, serta pembinaan penyuluh swasta.

"Terkait dengan materi penyuluhan, dalam Perpres ini materi penyuluhan lebih menekankan pada peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan kualitas konsumsi pangan," tambahnya. Untuk jaminan ketersediaan prasarana dan sarana, Eddy mengatakan, akan diberikan pusat dan daerah berupa kantor dan fasilitas lainnya yang diperlukan.

Herman/Yul



Suara dari Senayan

Sosialisasi Perpres No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian yang baru saja disahkan terus dilakukan Kementerian Pertanian. Berbagai dukungan dan masukan terhadap implementasi Perpres No. 35 Tahun 2022 terus berdatangan termasuk dari Anggota Dewan.

Salah satunya dari anggota Komisi IV DPR RI, Ir. Hanan A. Rozak, M.S yang menganggap lahirnya Perpres No. 35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian sangat penting. Apalagi adanya indikasi pelemahan penyuluh pertanian dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pelemahan ini dirasakan ketika lahirnya UU No. 23 Tahun 2014, yang sebelumnya ada UU No. 16 tahun 2006 yang terkait dengan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Ini sepertinya ada disharmonisasi antar UU No 16 dan UU No 23. Ada pelemahan penyuluh pertanian di daerah," tutur mantan Bupati Tulang Bawang, Lampung tersebut.

Hanan menambahkan, saat itu ditingkat Provinsi ada Bakorluh, tingkat Kabupaten ada Bapeluh, di tingkat Kecamatan ada BPP dan di tingkat bawah ada Posluhdes. Namun dengan adanya UU No 23, Bakorluh dan Bapeluh bukan termasuk lembaga yang diprioritaskan, bahkan dihapuskan dan fungsi penyuluh perikanan dan kehutanan di tarik ke pusat.

Dengan terbitnya Perpres No. 35 Tahun 2022 berarti ada hal yang sangat penting untuk membenahi penyuluhan agar berjalan normal. Seperti dalam UU No.16 Tahun 2006 menyebutkan fungsi penyuluh secara sederhana yakni bagaimana pengubah perilaku, khususnya petani sebagai pelaku utama.

Karena itu Hanan melihat kedepan peranan BPP ditingkat Kecamatan dan Posluhdes ditingkat Desa harus diperkuat.

Petani nantinya dapat memperoleh semua informasi di BPP. "Di BPP petani bisa mendapatkan informasi terkait kebutuhan maupun persoalan pertanian. Di BPP petani bisa mencari jalan keluar, sehingga petani bisa datang untuk mencari informasi terkait pertanian. Jadi kedepannya penyuluh cukup ada di BPP," tambahnya.

Berbicara hubungan kerja, Hanan mengatakan Peraturan Menteri (Permen) terkait beberapa pasal perlu disegerakan. Ia mencatat ada beberapa pasal di Perpres No. 35 tahun 2022 yang perlu segera diterbitkan Permentan, seperti pada pasal 9, pasal 14, pasal 20 dan pada pasal 26.

Lebih lanjut Hanan menjelaskan setelah Permentan terbit, diperlukan sosialisasi secara masif hingga ketingkat bawah. Sebab, Gubernur harus memahami

persoalan penyuluhan ini, dan bagaimana komitmen Gubernur terkait Satminkal.

"Disini dimungkinkan kalau adanya UPTD penyuluhan pertanian atau kalau tidak di Satminkal di salah satu bidang yang menangani penyuluhan. Begitu pula para Bupati harus kita jelaskan, lalu kita perkuat BPP dan Posluhdes," ungkap anggota DPR itu.

Terkait anggaran, Hanan meminta kepada BPPSDMP untuk menyusun program-program untuk mendukung Perpres No. 35 Tahun 2022 ini. "Minggu-minggu ini kita sedang membahas untuk persiapan anggaran 2023. Tugas DPR adalah membahasnya lalu menyetujuinya. BPPSDMP harus bisa meyakinkan Biro Perencanaan dan Mentan bahwa program-program itu penting," ujarnya.

Herman/Yul

Suara dari Penyuluh

Sebagai ujung tombak pembangunan pertanian nasib penyuluh kerap terabaikan. Terlihat dari perhatian pemerintah daerah yang terbilang sangat kurang, termasuk dalam anggaran. Bahkan tugas penyuluh kini lebih banyak dilibatkan dalam urusan administrasi kedinasan



Suara penyuluh dari lapangan dilontarkan Bambang Riyanto, Penyuluh Pertanian Kabupaten Banyumas saat acara Ngobras (Ngobrol Asik): Yuk Kenali Perpres No. 35 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (5/4).

"Sejak tahun 1983 saya jadi penyuluh dan mengalami berbagai dinamika penyuluhan. Namun untuk penyuluh yunior saya melihat semangatnya perlu ditingkatkan, terutama ilmu dasar kepenyuluhan," katanya.

Bukan hanya itu, menurut Bambang, para pengambil kebijakan juga perlu mendapatkan sosialisasi mengenai penyuluhan pertanian. Sejak otonomi daerah, pejabat di daerah sering berganti, sehingga banyak yang tidak

mengerti soal penyuluhan.

"Jujur saja karena otonomi daerah, pejabat di dinas sering berganti orang, Paling tidak kalau mereka ada jiwa penyuluh, maka akan paham pertanian dan penyuluhan. Sekarang yang terjadi baru berdinis 1-2 tahun sudah diganti lagi," keluh Bambang yang dua tahun lagi akan memasuki usia pensiun. Bahkan Bambang mengaku, dirinya baru bisa membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) setelah 10 tahun bertugas.

Dalam penempatan penyuluh pertanian (wilayah kerja penyuluh pertanian/WKPP), Bambang sangat berharap harus melihat lokasi tempat tinggal. Selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Lokasi

tinggal penyuluh jauh dari WKPP. "Bagaimana penyuluh mau ke pertemuan petani pada malam hari kalau untuk menempuh tempat tinggal petani perlu waktu 1-2 jam. Itu sangat mempengaruhi kinerja penyuluh," tegasnya.

Minim Anggaran

Hal lain yang menjadi keluhan Bambang adalah minimnya anggaran untuk penyuluh pertanian. Di lokasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tempatnya bertugas, setiap penyuluh harus berbagi dana sebesar Rp 30 ribu untuk membeli kertas.

Bambang melihat kondisi ini terjadi karena belum adanya Peraturan Bupati mengenai pembentukan BPP. Dampaknya, Badan Keuangan Daerah (BKD) belum mengalokasikan anggaran. Untuk itu ia berharap ada surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Pemda membentuk BPP. "Kalau hanya surat dari Kementerian Pertanian kadang tidak digubris. Jadi perlu surat dari Kemendagri," katanya.

Karena itu Bambang setuju jika ada usulan memberikan anggaran 20 persen untuk kegiatan penyuluhan pertanian. Alasannya,

selama ini setiap kegiatan Pemda selalu melibatkan penyuluh pertanian, karena petugas yang ada ditingkat daerah adalah penyuluh.

"Kalau program dari pusat tidak dikuatkan oleh penyuluh akan sulit," tegasnya. Dengan demikian, Bambang sangat berharap ada dorongan dari pusat (Kemendagri) kepada bupati supaya ada anggaran dari daerah untuk penyuluh pertanian.

Sementara itu Siti Rohimah, Penyuluh Pertanian Sumatera Barat juga mengakui sejak ada pelimpahan ke daerah, kelembagaan penyuluh pertanian tidak mempunyai bentuk. Bahkan setiap daerah mempunyai bentuk sendiri, tergantung kebijakan dan komitmen Pemda. "Karena tidak ada kelembagaan, kami dititipkan ke dinas," katanya.

Bahkan mirisnya lagi penyuluh kini banyak dibebankan tugas lain di luar kegiatan penyuluhan. Akibatnya, waktu bagi penyuluh pertanian untuk ke lapangan (petani) menjadi sangat berkurang. "Hakekatnya, waktu dan pikiran penyuluh itu hak petani. Tapi sekarang sudah tidak mungkin dijangkau, karena tangani tugas lain," ungkap Siti.

Dengan terbitnya Perpres No. 35 Tahun 2022, menurut Siti bagaimana mengawalinya. Berkaca dari UU No. 16 Tahun 2006 ternyata banyak Pemda yang kurang paham dan berkomitmen terhadap penyuluhan. "Sekarang ini bagaimana penyuluh bisa eksis lagi. Kami berharap kebijakan dari turunan Perpres mempertegas kedudukan Satminkal Penyuluh," katanya. **Yul**



Oleh: Memed Gunawan



Penyuluhan Berbiaya, Dampaknya Luar Biasa

Besarnya sambutan positif terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian menunjukkan harapan tinggi terhadap berlangsungnya penyuluhan yang ideal di negeri ini. Kelancaran penyuluhan pertanian tidak dapat disangkal lagi sedang terusik oleh melemahnya kondisi dan peran unit di lapangan maupun ketersediaan anggaran dan sarana pendukungnya. Terbitnya Perpres 35/2022 dapat dianggap sebagai momen kebangkitan penyuluh pertanian jilid kedua. Sebenarnya sejauh mana biaya penyuluhan membebani anggaran?

Sebagai kegiatan yang memfokuskan kegiatannya pada peningkatan pengetahuan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan serta distribusi informasi secara terus menerus, penyuluhan adalah kegiatan rutin yang berbiaya besar. Selain itu memerlukan sumberdaya manusia (SDM) penyuluh dalam jumlah besar sehingga membebani anggaran Pemda maupun Pusat, sementara dampak penyuluhan tidaklah "cespleng" dan cukup bisa dilakukan sekali-sekali seperti minum obat pusing.

Kegiatan ini lebih merupakan peningkatan kemampuan dan informasi kepada petani yang mempunyai dampak besar terhadap produksi, teknik budidaya, pendapatan dan kesejahteraan petani yang pada gilirannya juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi keberadaan penyuluhan sangat penting, harus dilakukan terus-menerus, memerlukan perencanaan dan strategi jangka panjang, tapi tidak bisa mematok target keberhasilannya dalam jangka pendek. Jadi? Indikator keberhasilan penyuluhan bukanlah kenaikan PAD sektor pertanian dalam jangka pendek. Jika kinerja jangka pendek yang ingin terlihat, penyuluhan bukan strategi yang jitu untuk mencapainya.

Kenyataannya, kegiatan penyuluhan di daerah umumnya merupakan porsi yang kecil dengan anggaran dan fasilitas kecil, bahkan di beberapa daerah menjadi kegiatan yang bukan prioritas. Padahal ada pemeco bahwa yang utama harus dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertanian adalah penyuluhan dan informasi teknologi.

Anggaran penyuluhan di Indonesia masih memerlukan angka yang cukup besar dan perlu dicari kreativitas baru dalam penyuluhan. Koordinasi untuk menguatkan kembali fungsi penyuluhan pertanian, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat yang tercantum dalam Perpres 35/2022 adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu didorong agar Perpres ini segera ditinjaulanjuti dan dapat segera dilaksanakan.

Masih banyak upaya meningkatkan penyuluhan dan mengefektifkan dana. Antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi Penyuluh Pertanian Swasta, Penyuluh Swadaya dan menggencarkan program magang yang selama ini sudah cukup berhasil.

Demikian juga *Cyber extensions* atau *media informasi digital* lainnya menjadi sangat penting, tetapi tanpa menghilangkan komunikasi dua arah dan tatap muka antara petani dengan aparat penyuluh sehingga tidak kehilangan hubungan kemanusiaan, yang justru merupakan unsur penting dan efektif dalam penyuluhan.

Sudut Pandang Penyuluh PPPK : Menatap PERPRES NO. 35 TAHUN 2022

Oleh : Nur Samsu *)

Hadirnya Perpres 35/2022 diakui menimbulkan optimisme dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Tanah Air. Jika ditelisik. Batang tubuh Perpres ini terdiri dari 6 (enam) pilar penguatan fungsi penyuluhan pertanian yaitu (1) Penguatan hubungan kerja, (2) Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, (3) Penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan, (4) Materi penyuluhan pertanian, (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan (6) Jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.

Dari keseluruhan pilar tersebut, khususnya mengenai ketenagaan penyuluh nampaknya bersentuhan langsung dengan aspirasi dan harapan teman-teman Penyuluh Pertanian PPPK dan THL TBPP yang hingga saat ini masih belum mendapatkan kesempatan beralih status menjadi ASN PPPK. Penting juga untuk menelaah potensi integrasi Perpres No. 35 Tahun 2022 di dalam ekosistem peraturan-peraturan yang terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

Seperti diketahui, setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Pemerintah telah melaksanakan perekrutan Penyuluh Pertanian ASN dari unsur PNS dan PPPK. Tahun 2016 Pemerintah telah merekrut sekitar 6000 THL TBPP Kementerian Pertanian menjadi CPNS Penyuluh Pertanian dengan status sebagai PNS di daerah penempatan masing-masing melalui seleksi CAT. Tahun 2019, Pemerintah untuk pertama kalinya merekrut Penyuluh Pertanian ASN PPPK Tahap I 2019 melalui seleksi CAT nasional. Sebanyak sekitar 12 ribuan THL TBPP Kementerian Pertanian lolos dan pada awal tahun 2021 resmi diangkat sebagai ASN PPPK di pemerintah daerah masing-masing.

Hingga saat ini, masih tersisa sekitar 2000 an THL TBPP Kementerian Pertanian secara nasional yang bekerja di provinsi dan kabupaten/kota tertentu yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi menjadi ASN PPPK Penyuluh Pertanian. Sangat memprihatinkan karena kesempatan teman-teman menjalani pengabdian sebagai tenaga non ASN tak sampai hitungan 2 tahun lagi. Sebab, Pemerintah hanya memberi kesempatan hingga tahun 2023 bagi tenaga-tenaga non ASN untuk menjalankan kegiatannya sebagai tenaga honorer maupun

tenaga kontrak pemerintah.

Pada tahun 2020, terbitlah Permenpan No. 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Pertanian. Dalam Pasal 3 disebutkan dengan terang bahwa JF Penyuluh Pertanian merupakan jabatan karir PNS. Dalam keseluruhan ketentuan dalam Permenpan tersebut tak sekalipun menyebut PPPK. Artinya lingkup dan peruntukan Permenpan No. 35 Tahun 2020 ini adalah memang hanya untuk PNS.

Pertanyaannya kemudian dimana posisi dan status Penyuluh Pertanian PPPK? Kalau jabatan fungsional penyuluh pertanian hanyalah sebagai jabatan karir PNS, lalu Penyuluh Pertanian PPPK ini sebagai apa status dan kedudukannya? Mengapa Pasal 3 tidak berbunyi "Jabatan fungsional penyuluh pertanian merupakan jabatan karir PNS dan jabatan kompetensi PPPK"? Sebagai catatan PP Manajemen PNS menyebut mekanisme pengembangan karir untuk PNS dan pada PP Manajemen PPPK mekanisme pengembangan kompetensi untuk PPPK.

Sejujurnya menjadi pertanyaan luas di kalangan teman-teman PPPK Penyuluh Pertanian di daerah tentang bagaimana perjalanan ke depan status jabatan penyuluh PPPK ini? Apakah bisa naik golongan jabatannya? Kalau bisa naik akan melalui mekanisme apa? Bagaimana wujud mekanisme pengembangan kompetensi yang tertera jelas dalam salah satu ketentuan PP Manajemen PPPK?

Maka harapan kepada Pemerintah setelah terbitnya Perpres tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian adalah adanya perhatian lebih terhadap peta jalan pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian PPPK sehingga teman-teman tidak lagi dibayangi kecemasan perihali stagnasi jenjang jabatan berikut implikasinya. Konkritnya teman-teman PPPK menunggu terbitnya Permenpan tentang Jabatan Penyuluh Pertanian PPPK.

Harapan kedua yang tak kalah urgen terkait penyediaan tenaga penyuluh ini adalah adanya perhatian dan upaya lebih dari Pemerintah Pusat cq Kementerian Pertanian untuk lebih kuat mendorong pemerintah daerah tertentu untuk segera membuka kesempatan bagi teman-teman 2000 an THL TBPP Kementerian Pertanian agar bisa beralih status menjadi ASN PPPK Penyuluh Pertanian. Kesempatan teman-teman ini tersisa hanya hingga tahun 2023.

*) Penyuluh Pertanian PPPK, BPP Kecamatan Paiton - Kabupaten Probolinggo



Kian Menarik, Petani Kejar KUR Taksisintan

Minat petani untuk melakukan pembelian alat mesin pertanian (alsintan) secara mandiri terus meningkat. Di Jawa Tengah, program Taksisintan, makin banyak dikejar para petani. Taksisintan ini merupakan program penyediaan alsintan secara mandiri pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Misalnya, Sugiyarto, petani asal Karanganyar, Kabupaten Demak, bersyukur keinginannya untuk bisa memiliki traktor crawler akhirnya terwujud. Ia mengapresiasi program yang diluncurkan pemerintah yang tak lagi mengandalkan proposal bantuan.

"Ini luar biasa, karena program KUR ini saya akhirnya bisa memiliki traktor untuk mengolah lahan pertanian saya sendiri," kata Sugiyarto, saat Penyerahan Alsintan Pada Kegiatan Pengembangan Program Taksisintan Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Jumat (1/4).

Sugiyarto mengaku sudah lama mengidamkan traktor roda crawler ini. Ini baru terwujud setelah Kementerian Pertanian langsung turun tangan membantu mempermudah kepemilikan alsintan melalui Program Taksisintan.

Selain Sugiyarto, terdapat tujuh petani yang mendapat persetujuan untuk memperoleh KUR pembelian alsintan. Yakni, Supriyanto dan Subrihaji, petani asal Pati yang menerima KUR Traktor Roda Empat.

Kemudian Akhmad Kholid, petani asal Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Giarto dari Gondang, Sragen, Ali Aziz dari Wonosalam, Demak dan Sukran Anta asal Gabus, Pati, yang

mendapat persetujuan KUR untuk pembelian combine harvester.

Giarto juga bersyukur KUR untuk pembelian combine harvester bisa direstui pihak bank. "Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyedia alsintan, pihak bank terutama Kementerian Pertanian yang telah sangat membantu dalam proses pencairan KUR ini. Ini nantinya digunakan untuk mengolah lahan pertanian seluas 300 hektar di desa kami," tuturnya.

Petani Mandiri

Sementara itu, Direktur Alsintan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, program Taksisintan ini adalah upaya menghadirkan teknologi pertanian yang maju, mandiri dan modern di tengah-tengah petani.

Melalui program ini, petani tidak lagi tertuju kepada bantuan yang berasal dari APBN, tetapi bisa mengadakan pembelian sendiri dengan insentif dari KUR. "Ini yang kami dorong agar petani kita bisa lebih mandiri," katanya.

Andi Nur mengatakan, dana pemerintah untuk bantuan alsintan ke petani memang sangat terbatas. Untuk tahun ini saja, anggaran belanja alsintan kini tersisa Rp 600 miliar. "Jadi Taksisintan hadir sebagai terobosan dalam membantu petani untuk mengadakan pembelian alsintan dengan kredit ringan," ucapnya.

Sementara itu Koordinator Pelembagaan Alsintan Erna R. Wardhani menambahkan, Taksisintan ini memang didorong agar petani bisa cepat berinovasi dan beradaptasi dalam pengelolaan pertanian, mulai dari olah tanah sampai panen. Lebih penting lagi, pertanian menjadi lebih menarik, sehingga bisa mendorong anak muda saat ini terjun ke pertanian.

"Dulu kan bapaknya petani, anaknya belum tentu. Tapi sekarang makin banyak petani milenial terjun ke pertanian karena pertanian itu keren. Megang traktor keren," jelasnya.

Paket Unit Jasa Taksisintan

Bagi petani atau kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berniat menjalankan usaha Taksisintan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan paket. Untuk satu unit jasa Taksisintan meliputi jasa sewa alsintan yang terdiri dari jasa olah tanah, jasa tanam, jasa panen. Selain itu juga, jasa service dan bengkel, serta penyediaan spare part dan suku cadang.

Dalam satu unit Taksisintan minimal memiliki Traktor Roda 4 sebanyak 2 unit, Traktor Roda 2 (5 unit), cultivator (3 unit), pompa air (5 unit), handprayer (5 unit) dan combine harvester (2 unit). "Jenis alsintan ini tidak mengikat. Jika di suatu daerah sudah memiliki traktor roda empat dan membutuhkan combine harvester dan traktor roda 2, silahkan saja," kata Handi Arif, dari Direktorat Alsintan, Ditjen PSP.

Sedangkan ruangan pool Taksisintan terdiri dari, ruang registrasi (meja counter), ruang spare part dan suku cadang, ruang service dan pemeliharaan, ruang manajemen IT atau pengelolaan pemesanan melalui aplikasi android, ruang konsultasi dan bimtek, ruang parkir

alsintan dan ruang *door smeer*.

Taksisintan ini kata Handi, nantinya akan dilaksanakan di 500 kabupaten/kota sentra produksi pangan. Nantinya masing-masing kabupaten/kota dialokasikan 4 unit Taksisintan, sehingga total alokasi Taksisintan sebanyak 2.000 unit. "Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Taksisintan tidak dengan APBN, tapi menggunakan KUR," kata Handi.

Sementara itu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai, pertanian yang maju, mandiri, dan modern mustahil tercapai tanpa mekanisasi pertanian. Dengan intervensi teknologi, dimungkinkan tercapai efisiensi yang bermuara pada pengurangan biaya produksi.

Sejak pemerintah memberikan bantuan alsintan, level mekanisasi pertanian di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dari 0,5 HP/ha pada tahun 2015 menjadi 2,1 HP/ha pada tahun 2021 (meningkat 236 persen). Pemerintah menargetkan level mekanisasi ditingkatkan menjadi 3,5 HP/ha pada tahun 2024.

Namun SYL mengakui, negara-negara lain pada tahun 2015 telah memiliki level mekanisasi yang jauh lebih tinggi seperti USA 17 HP/ha, Jepang 16 HP/ha, Malaysia 2,4 HP/ha, dan Thailand 2,5 HP/ha, serta Vietnam 1,5 HP/ha.

"Salah satu inovasi yang kita dorong untuk mendukung kemajuan mekanisasi pertanian adalah program Taksisintan. Melalui program ini, masyarakat bisa memiliki alsintan sendiri, atau secara bersama-sama dengan pembiayaan melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian," tutur SYL.

Yul/Ditjen PSP

info PSP

KUR Petani Diterima Perbankan, Perhatikan Syaratnya

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu alternatif bagi petani untuk mendapatkan permodalan usaha tani di tengah kian terbatasnya anggaran pemerintah. Namun persoalannya tak mudah bagi petani mengakses pembiayaan tersebut.

Pasalnya banyak petani yang tak familiar dengan sistem perbankan. Bagaimana agar KUR bisa diterima (*approved*) pihak perbankan? "Ada banyak alasan kenapa KUR tertolak pihak bank," kata widyaiswara Ahli Muda, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Rizky Permana saat Training of Trainer bagi Widyaiswara, Dosen, Guru dan Penyuluh Pertanian "Sistem Pengelolaan Taksisintan" beberapa waktu lalu.

Alasan tersebut lanjutnya, tidak ada kegiatan usaha, tujuan pengajuan KUR kurang jelas, dokumen tidak lengkap, riwayat pinjaman yang buruk, mempunyai tanggungan atau tunggakan pinjaman lain. Selain itu juga jumlah pinjaman yang terlalu besar dari kemampuan usaha.

Jika melihat perkembangan serapan KUR Pertanian memang cukup besar. Misalnya tahun 2020 mencapai 1,9 juta debitur dan realisasi kredit Rp 55,30 triliun (110,62 persen) dari target Rp 50 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 2,6 juta debitur dan realisasi kredit Rp 85,62 triliun (122,31 persen) dari target Rp 70 triliun. Untuk Tahun 2022, target KUR Pertanian sebesar Rp 90 triliun.

Rizky mengakui, meski KUR untuk petani digulirkan Kementerian Pertanian, bukan berarti perbankan serta merta menggelontorkan KUR tanpa prinsip kehati-hatian. "Kementan hanya subsidi bunganya, tetapi uang yang diberikan sebagai pinjaman kepada petani adalah uang dari pihak bank," tegasnya.

Karena itu, calon debitur (pengaju KUR) wajib membangun kepercayaan (*trust*) dengan pihak bank. Mulai dengan memenuhi syarat pengajuan kredit seperti dokumen pengajuan yang dilampirkan dengan identitas (berupa E-KTP, KK, dan Akta Nikah) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Syarat lain, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun surat keterangan usaha lainnya. "Khusus KUR untuk Alsintan, syarat kredit adalah jaminan tambahan. Berupa sertifikat tanah dan bangunan," tuturnya.

Tips kedua adalah latar belakang profil debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau dahulu dikenal sebagai

BI Checking serta pengecekan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai NIK debitur. "Sering terjadi adalah nama debitur dipinjam nama oleh anggota keluarga untuk menjadi debitur lain, sehingga ketika dicek, nama debitur sudah memiliki pinjaman tertentu," ungkapnya.

Prinsip 5C

Rizky memaparkan, dalam perbankan memiliki prinsip 5C yakni *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition of economy*. Dalam kredit, *character* mengukur watak debitur serta kemauan untuk membayar (*willingness to pay*).

Adapun penilaian karakter ini antara lain keuletan dalam berusaha, tanggung jawab, kejujuran, kreativitas, kesabaran, gaya hidup bahkan sejarah kekerabatan (kaitannya dengan hutang piutang). Sedangkan *capacity* adalah kemampuan debitur menjalankan usaha dan mengetahui sejauh mana kemampuan melunasi kewajibannya tepat waktu.

Untuk *collateral*, yakni jaminan yang diserahkan debitur dan sejauh mana *recovery rate debitur* (jaminan dijual cepat atau tidak). *Collateral* (jaminan) terdiri dari dua macam yakni material (mesin/peralatan, kendaraan, emas, persediaan barang dan lainnya) serta im material (kepercayaan, tagihan, jaminan bank, surat berharga, *feasibility study* dan sebagainya).

Sedangkan *capital*, merujuk pada dana atau modal usaha yang dimiliki debitur serta kemampuan self financing debitur. Karenanya, bank biasa melihat pada aspek keuangan seperti Neraca Laba Rugi dan *cashflow*.

Untuk *condition*, adalah kondisi sosial ekonomi bahkan politik, budaya dan keamanan di daerah tersebut. "Ada tambahan satu lagi yakni constrain dimana berupa batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan bisnis tersebut dilakukan," katanya.

KUR Alsintan

Serupa dengan pembiayaan sektor pertanian lainnya, Rizky menyebutkan, KUR untuk alsintan memiliki kriteria tertentu untuk calon debitur (pengaju KUR). "Khusus KUR untuk alsintan, harus ada agunan tambahan. Kalau pinjaman diatas Rp 100 juta harus ada agunan," tegasnya.

Hal ini sesuai ketentuan Permenko No 1 Tahun 2022 yang mana calon debitur KUR adalah

BAGAIMANAKAH CARA UMKMK (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI) MENDAPATKAN KUR DARI BANK ?

INDONESIA.GO.ID
Portal Informasi Indonesia



Apa saja yang menjadi persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR?
Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain:
1. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
2. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
3. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll
4. Catatan pembukuan atau laporan keuangan
5. Salinan bukti agunan

Syarat dan Ketentuan :

- ☒ Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, kecuali kredit konsumtif.
- ☒ Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya; kecuali untuk KUR Mikro
- ☒ Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.

1Indonesia goid 1Indonesia goid 1Indonesia goid 1Indonesia Go Id

debitur KUR eksisting atau calon debitur baru yang tidak menerima kredit/pembiayaan selain KPR, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit dengan jaminan SK Pensiun, Kartu Kredit, Resi Gudang, Kredit Konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga.

Rizky mengaku, sebagai produk perbankan saat ini memang belum ada skema KUR Alsintan. Namun, KUR untuk pembelian alsintan ini bisa masuk pada kriteria KUR super mikro (kurang dari Rp 10 juta), KUR mikro (plafon Rp 10-100 juta) maupun KUR kecil (Rp 100-500 juta), tergantung harga jual alsintan yang dibutuhkan petani dan diajukan ke bank. "Harga combine harvester misalnya, Rp 400 juta, maka pengajuannya pada KUR Kecil," ujarnya.

Sesuai aturan, KUR Kecil dengan plafon Rp 100-500 juta tersebut memiliki suku bunga 6 persen per tahun dengan lama kredit, tergantung peruntukan pengambilan KUR. Untuk Kredit Modal Kerja (KMK), maksimal 4 tahun, sedangkan Kredit Investasi (KI), maksimal 5 tahun.

Kriteria selanjutnya adalah lama usaha tani, minimal 6 bulan. Kemudian dokumen pengajuan dilampirkan dengan identitas (berupa E-KTP, KK, dan Akta Nikah) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun surat keterangan usaha lainnya.

Menurut Rizky, dalam pengajuan KUR untuk alsintan, petani pengaju KUR maupun penyuluh pendamping harus mengetahui pembelian alsintan itu untuk modal kerja atau investasi. "Kalau beli alatnya hanya untuk berfungsi selama 1 tahun, maka disebut modal kerja. Tapi, kalau beli alatnya dan bisa dipergunakan lebih dari satu tahun, itu disebut investasi," tegasnya.

Dengan demikian, Rizky mengatakan bahwa pembelian alsintan tergolong pada kredit investasi. Sebab kebutuhan investasi meliputi bangunan, mesin produksi, peralatan penunjang, kendaraan, dan biaya pra operasional agar bisa melakukan produksi sesuai rencana.

Karena tergolong kredit investasi, Rizky menyarankan, dalam pengajuan KUR untuk alsintan, harus tersedianya sharing dana sendiri (SDS) atau lebih dikenal sebagai DP (Down Payment). Idealnya, 30-40 persen dan nyata ada di tabungan atau cash.

"Kalau tanpa DP, bukan berarti lebih murah, tetapi DPnya dimasukkan kedalam pokok hutang sehingga semakin lama menganggur, semakin banyak yang harus dikembalikan," tuturnya.

Gsh/Yul/Ditjen PSP



Pupuk Organik Solusi di Tengah Krisis Lahan

Penggunaan pupuk kimia yang terus menerus dan berlebihan oleh petani telah membuat tanah/lahan pertanian menjadi kritis. Sebagai upaya mengembalikan kesuburan lahan, pupuk organik menjadi alternatifnya.

Hasil kajian Balai Penelitian Tanaman Pangan (BB Padi), kondisi tanah sawah irigasi di Indonesia, khususnya di Jawa, tanah mengalami penurunan kesuburan. Bahkan kadar organik tanah sudah sangat menurun, kurang dari persen.

Akibat tanah yang tak subur tersebut, penggunaan pupuk dan pestisida kimia menjadi tidak optimal. Di beberapa lokasi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, petani menggunakan pupuk anorganik hingga 600 kg hingga 1 ton. Namun produktivitas tak bergerak naik, justru stagnan.

Karena itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan kesuburan lahan melalui penggunaan pupuk organik. Hal ini disampaikan Dedi dalam rapat dengar pendapat bersama Ketua HMPO, KTNA dan HKTI, beberapa waktu lalu.

Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, penggunaan pupuk organik merupakan sebuah keharusan untuk kepentingan pertanian Indonesia yang jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. "Penggunaan pupuk organik itu sebuah keharusan kalau pertanian kita ingin go internasional," katanya.

Kenapa? Jika hanya mengandalkan yang ada saat ini, Dedi

menilai sangat berat. "Orang sunda itu dari dulu punya istilah banyak pare, konci leuwit duit loba. Dipikir ada si jabrik di kolong ada si jambong dan di tukang ada kambing. Semuanya berkaitan dengan pupuk organik," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi Gerindra, Endang Setyawati Thohari mendukung penuh penggunaan pupuk organik sebagai alternatif, juga solusi jangka panjang dalam mengembalikan kesuburan lahan. Karena itu, ke depan Endang meminta agar ada grand strategi untuk kepentingan petani. "Jadi siapapun menterinya siapapun pejabatnya penggunaan pupuk organik ini tetap jalan," katanya.

Sementara itu Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik (HMPO), Muhammad Parto mengatakan, keberadaan pupuk organik sudah seharusnya mendapat perhatian serius. Bahkan pemerintah harus mendukung dan merangsang petani untuk mencintai pupuk organik. Salah satunya dengan mengalokasikan subsidi.

Menurut Parto, berdasarkan pengalaman HMPO, kotoran hewan dari ujung Madura sampai pulau terluar lainnya secara rutin diangkut dan dibersihkan Petrorganik. "Kami adalah pejuang lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena semua kotoran ayam dari ujung Pulau Madura sampai ke timur kami yang

menghabiskan, sehingga polusi bau yang dikeluhkan masyarakat bisa diatasi," tuturnya.

Sementara itu Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta memastikan semua anggota KTNA di seluruh daerah akan mendukung penuh kebijakan dalam memaksimalkan pemakaian pupuk organik. Hal senada juga diungkapkan Sekjen HKTI Sadar Subagyo. Menurutnya, cakupan penggunaan pupuk organik harus diperluas secara merata di seluruh daerah.

Geliat Milenial Berorganik

Pertanian organik kini menjadi alternatif mengembalikan kesuburan lahan. Keuntungan lainnya dari cara bertani ini adalah harga hasil panen lebih menggiurkan. Dengan kelebihan itu, banyak milenial yang terjun ke dunia pertanian memilih bertani secara organik.

Seperti Muhammad Yayan yang kini mendapat amanah sebagai Ketua Koperasi Tani Produksi Mentari Sinari Alam (MSA). MSA adalah koperasi petani padi di Tasikmalaya yang menerapkan sistem pertanian organik berbasis teknologi dan inovasi modern.

"Rata-rata, petani memiliki lahan seluas 1,1 hektar (ha) dengan produktivitas 2,9 ton/ha. Panen berlangsung pada Juni, Oktober, dan Februari," kata Yayan. MSA kini telah memproduksi, mengolah, dan memasarkan beras organik dari varietas Pandan Wangi, Inpari 24, Ciherang, Sintanur, dan Situbondo.

Dengan anggota 373 petani, sebanyak 66 diantaranya telah memperoleh sertifikat organik

internasional dari Uni Eropa dan Departemen Pertanian Amerika Serikat.

Sementara itu PP Gapsera Sejahtera Mandiri (GSM) merupakan perkumpulan kelompok tani yang ada di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang mengembangkan pertanian ramah lingkungan.

Ketua PP GSM Sukarlin mengatakan, berawal dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tanpa merusak lingkungan, dirinya mengaplikasikan pengendalian hayati pada lahan padi yang dimiliki. Kegiatan pengendalian hayati diperoleh Sukarlin dari kegiatan pelatihan yang pernah diikutinya.

"Awalnya saya sedikit kesulitan dalam memasarkan produk hasil panen, karena masih menggunakan pupuk kimia yaitu 60 persen pupuk kompos 40 persen pupuk kimia, sehingga tidak dapat disebut beras organik," ujarnya.

Namun setelah di uji di laboratorium ternyata residu pestisida nihil. Dari hasil uji tersebut, Sukarlin kemudian terus mengembangkan pertanian ramah lingkungan. Produksi berasnya kini menggunakan brand BERASERA atau Beras Sehat Bebas Pestisida yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Sementara itu, Galih Wiranegara, Ketua Korporasi Tani Ngawi Mandiri (KTNM) mengatakan, koperasinya yang berdiri pada 24 November 2020 telah menjadi daya dukung untuk pertumbuhan pertanian di kabupaten Ngawi. Sedikitnya ada sekitar 45 Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) yang tergabung dalam Koperasi Ngawi Tani Mandiri.

KNTM menjadi fasilitator untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan memasarkan produk hasil pertanian. KNTM juga membantu petani mencukupi kebutuhan pupuk, khususnya pupuk non subsidi. Sebab untuk pupuk subsidi, tataniaga dan distribusi telah ditentukan sesuai regulasi yang ada. "Selain itu, KNTM juga membantu memberikan pinjaman benih," ungkapnya.

Galih menegaskan, koperasi memiliki peran penting bagi petani yakni memberi pinjaman benih kepada petani, kemudian memberikan pinjaman pupuk non subsidi kepada petani. Kemudian hasil panennya dihubungkan ke pasar. "Petani yang ikut kemitraan semua produknya dibeli oleh perusahaan yang dikerjasamakan dengan KTNM," katanya.

Yul/Ditjen PSP

Pakar Menjawab

Sampaikan pertanyaan tentang pertanian melalui WA ke: 087881605773
atau ke: sintani@cbn.net.id sertakan nama dan alamat anda

Inilah Teknik Perkecambahan Benih Pepaya

Dalam bertanam pepaya, masyarakat sebenarnya hanya cukup tebar tanam saja. Namun apakah ada cara yang efektif untuk bisa menghasilkan tanaman pepaya yang berbuah baik?

Mimin – Sambas

Sampai saat ini perbanyak tanaman pepaya adalah secara generatif, yaitu dengan menyemaikan biji dari buah yang sudah masak. Perbanyak secara vegetatif masih sulit dilaksanakan, walaupun bisa yaitu dengan cara mencangkok batang, dan kultur jaringan tetapi tidak efisien untuk penyediaan bibit dalam jumlah besar.

Satu-satunya cara yang mudah dilakukan adalah dengan menggunakan biji, karena dari satu buah bisa diperoleh biji dalam jumlah banyak. Biji tersebut dapat langsung ditanam di kebun atau dapat disemaikan terlebih dulu.

Biji tanaman pepaya sangat peka terhadap pengaruh suhu dan kelembaban maka disarankan dalam mengecambahkan benih dilakukan secara hati-hati. Perkecambahan benih pepaya ternyata juga dipengaruhi cahaya,

suhu dan kelembaban. Benih pepaya memerlukan cahaya untuk berkecambah.

Jika baru membeli benih pepaya komersial, benih tersebut bersifat dorman (istirahat) atau tidak dapat segera berkecambah. Karena itu, bisa dilakukan perlakuan heat shock pada suhu 35-40°C selama 4 jam kemudian ke air suhu 26°C sebelum dikecambahkan. Perendaman air selain untuk pematangan dormansi juga diperlukan untuk melunakkan kulit benih agar air dapat masuk ke dalam biji.

Teknik mengecambahkan benih pepaya dimulai dengan perendaman benih dilakukan dengan menggunakan air hangat (40-55°C), setelah direndam benih ditiriskan. Langkah selanjutnya, dibungkus menggunakan tissue dan semprot menggunakan air agar terjaga kelembaban benih. Masukkan benih yang sudah dibungkus tadi ke dalam petridis dan tutup rapat. Letakkan di tempat dengan suhu ruang 26-31°C.

Cara kedua, dengan menyiapkan kertas tisu selanjutnya benih dibungkus menggunakan tisu tersebut dan semprot menggunakan air agar terjaga kelembaban benih.

Masukkan benih yang sudah dibungkus tadi ke dalam Botol Kultur Jaringan dan tutup rapat menggunakan plastik dan diikat dengan karet. Letakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, tetapi jangan terlalu terik sinarnya. Selanjutnya dijaga kelembaban benih dengan cara disemprot menggunakan air setiap hari.

Atau bisa juga dengan disemai menggunakan pasir, cukup dengan menyiapkan wadah styrofoam lalu diisi dengan media. Media yang digunakan adalah pasir. Selanjutnya setiap styrofoam pasir diisi tidak terlalu penuh selanjutnya benih disemai. Letakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, tetapi jangan terlalu terik sinarnya. Selanjutnya dijaga kelembaban benih dengan cara disemprot menggunakan air setiap hari.

Langkah lainnya, penimbunan benih terbungkus kain dengan pasir menggunakan wadah untuk penguburan. Wadah yang digunakan adalah pot tanaman yang berisi media pasir. Selanjutnya siap kan kain basah/lembab dan bungkus benih menggunakan kain tersebut dan diikat sesuai dengan pengulangan masing-masing,

Selanjutnya dijaga kelembaban benih dengan cara disemprot menggunakan air setiap hari.

Benih mulai berkecambah pada hari ke-7, tetapi pada hari ke-12 hari setelah semai (HSS) menunjukkan bahwa cara perkecambahan dengan penimbunan benih terbungkus kain dengan pasir (cara ke 4) memiliki jumlah benih berkecambah tertinggi dibanding cara lain. Cara perkecambahan dalam wadah petridish (cara ke 1) dan botol tertutup (cara ke 2) menghasilkan jumlah benih berkecambah yang lebih rendah dibanding cara lainnya.

Apabila setelah 7-12 hari belum kecambah, dapat diberi perlakuan dengan cara merendam kembali biji dengan air hangat 10-30 menit kemudian diletakkan kembali pada kertas tisu lembab. Ditunggu antara 3-5 hari biasanya akan berkecambah. Selain itu dapat dilakukan penyemprotan dengan larutan KNO₃ 2%.



Oleh: Tri Budiyantri, SP, Peneliti Balai Penelitian Buah (Balitbu) Tropika



Selama bertahun-tahun bekerja sebagai peneliti, penulis merekam banyak data dan berbagai kejadian yang dilihat dan dirasakan di sekitar pedesaan dan pertanian. Catatan itu memberikan gagasan kepada penulis untuk menggambarkan kembali dalam bentuk tulisan Novel yang bisa dibaca juga oleh selain peneliti.

Paimin Pulang Kampung

"Namanya saja kekayaan alam. Tanah gambut dan lahan kering bahkan gurun pasir juga disebut kekayaan alam, bukan kemiskinan alam."

Tanah yang kurang cocok untuk tanam padi mengapa dipaksakan harus tanam padi. Mengapa tidak diusahakan untuk yang lain, lalu saling bertukar dan berdagang?

"Seperti sekarang ini," kata Paimin.

"Hawa panas jadi kendala buat yang sebagian orang, tapi jadi berkah buat tukang es. Tukang es seperti punya kesempatan untuk berjualan karena anak-anak SD itu

pasti akan kehausan."

Dia mengatupkan mulutnya, menggigit bibirnya, dan mengepal-kan tangannya.

"Tinggal mengatur supaya mendapat kesempatan. Seandainya aku jadi penguasa. Lantas?" Paimin tertawa.

Dia tidak merasa punya kemampuan untuk itu.

"Biar ahlinya yang mengatur semua ini. Tinggal kehancuran yang akan terjadi kalau pekerjaan besar dan memerlukan tanggungjawab besar itu diberikan pada orang yang tidak tahu. Tidak mengerti. Bukan ahlinya. Orang yang tidak sadar

bahwa pekerjaannya menentukan kehidupan orang lain," gumamnya.

"Kalau aku jadi penguasa, akan aku berikan jabatan kepada orang yang memang ahlinya. Bukan kepada orang yang hanya bersemangat untuk mendapat jabatan. Mengejar jabatan. Membeli jabatan. Mencari kekayaan dari jabatan."

"Hanya saja, mengapa orang berlomba, berebut, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan keyakinan, dan sampai tega memfitnah dan menghancurkan yang lain, hanya untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan? Pasti ada apa-apanya kalau sampai seperti itu," katanya sambil jarinya menunjuk batang kayu tiga kali.

Paimin mempercepat langkahnya melintasi lapangan kecil tempat anak SD bermain bola. Keringatnya bercucuran membasahi lehernya. Topi pandan yang sengaja dibawanya dari Jakarta lumayan masih melindungi kepalanya sehingga kulit kepalanya yang ditumbuhi rambut tipis itu tidak terbakar matahari. Panas seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah *global warming* sudah terjadi?

"Mungkinkah tanah tropis yang hijau dan dihampari badan air yang luas ini akan mengalami bencana kekeringan dan sekaligus banjir? Kehilangan pulaunya? Kerusakan biotanya? Lalu penurunan produksi pangannya?" hatinya berkata ragu.

"Pak ustadz bilang kiamat sudah dekat."

"Tapi aku sendiri sudah menyaksikan dampak kemiskinan

dan ketidakberdayaan. Seorang bapak melihat penderitaan anaknya mati kelaparan di beberapa belahan bumi ini, bukankah itu kiamat? Banyak orang sudah merasakan kiamat sebelum kiamat yang sebenarnya datang. Persis kata ustadz itu," kata Paimin.

"Aku lihat kemarin ustadz Zainuddin MZ di TV, katanya memang sudah ada kiamat kecil yang sekarang sedang terjadi."

Dia menerima banyak email tentang potret sedih kemiskinan. Kematian anak-anak yang badannya sudah begitu kurus tidak berdaging sehingga menyerupai kerangka manusia akibat kelaparan. Proses kematian dan pemusnahan manusia oleh manusia yang begitu keji akibat perselisihan antar kelompok manusia yang tidak jelas mengapa hal itu harus terjadi. Lalu kehancuran akibat bencana yang diciptakan manusia akibat keserakahannya. Ini proses menuju kiamat yang sebenarnya," pikir Paimin.

Bersamaan dengan itu, dia juga menerima email tentang gambaran mewah orang yang sedang diuji Tuhan dengan kekayaan dan kelebihan harta. Rumah besar dengan berpuluh kamar di dalamnya, mirip hotel. Siapa yang akan menghuni berpuluh kamar itu? Atau kendaraan super mewah pesanan pribadi yang berlapis emas dan tahan peluru. Karena takut ada orang menembaknya? Lalu kapal pesiar dan pesawat pribadi, yang harga satu bautnya saja bisa memberi makan orang miskin di Afrika selama berbulan-bulan. (48)

Bersambung



Febrika

Inspirator Petani Milenial dari Sambas

Petani milenial bisa menjadi sosok inspiratif bagi kalangan muda yang ingin terjun dalam dunia pertanian. Dengan kegigihannya bisa membawa sebuah cita-citanya sekarang. Salah satunya adalah Febrika dari Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Di usia yang masih sangat muda yakni 22 tahun, petani milenial dan anggota Gegertani bisa menggapai mimpinya. Tinggal di Desa Sebus, Kecamatan Paloh, dirinya fokus budidaya buah naga dan tanaman cabai. Ia menanam buah naga sebanyak 1.000 batang dan cabai 2.000 batang. "Saya terjun dalam dunia pertanian sudah memasuki tahun kelima. Ada dua tanaman yang saya fokus membudidayakannya, buah naga dan cabai," katanya kepada *tabloidsinartani.com*.

Dengan 1.000 batang buah naga, dalam satu sekali panen bisa menghasilkan 500-1000 kg/bulan. Sedangkan dari menanam cabai 2.000 batang, Febrika memperkirakan bisa mendapat penghasilan Rp 100 juta.

Febrika mengakui, dalam pemasaran memang mengalami

pasang surut. Kadang ia juga sering mengalami penjualan harga yang murah, terutama buah naga. "Dari sisi pasar memang mengalami pasang surut, kadang ada waktu yang pas terkena harga yang mahal dan kadang juga terkena harga anjlok, terutama buah naga saat masa panen besar. Untuk pemasarannya biasanya saya kirim ke Pontianak," ujar Febrika.

Febrika kini merasa senang terjun ke dunia pertanian, meski pada awalnya banyak tantangan, terutama masalah mental yang kadang masih perlu digodok. Namun dengan berjalannya waktu, ia dapat melewati dengan baik. Apalagi sekarang dirinya bisa gabung dalam wadah organisasi petani. "Masuk dalam dunia pertanian kita bisa mengatur keuangan sendiri. Jika mau hasil banyak, maka kita atur pola tanam

dan memang harus di rawat dengan baik. Pengalaman saya awalnya memang masalah mental yang menjadi masalah dan harus digodok," tuturnya.

Dari hasil jerih payahnya bertani, Febrika bisa membeli tanah seluas 5 hektar di Kecamatan Paloh, sehingga lahan yang dikelolanya kini bertambah luas. "Semoga juga ke depan bisa diberikan kemudahan, dan intinya juga kami sebagai petani muda minta perhatiannya juga oleh Pemerintah," katanya.

Menggerakkan Petani

Sementara itu, Ikram, Ketua Umum Gegertani Sambas mengatakan, sejak Gegertani didirikan hal yang pertama menjadi langkah ikhtiar adalah menggerakkan dan memberikan semangat buat generasi muda yang terjun di dunia pertanian. "Kita

bersama rekan-rekan Gegertani adalah menggerakkan potensi generasi muda untuk terjun di dunia pertanian, karena potensi dalam dunia pertanian sangat besar sekali," ujar Ikram.

Ikram mengatakan, prinsip di Gegertani adalah membawa pola pembinaan, pendampingan dan memberikan motivasi. Karena itu, setiap terjun ke desa-desa, prinsip tersebut selalu ditanamkan kepada kepada generasi muda pertanian. "Di Gegertani itu kita membawa pola pembinaan, pendampingan dan juga memberikan semangat. Jadi setiap ke lapangan hal itu yang menjadi modal kami," katanya. Bagi Ikram, petani milenial adalah corong masa depan Indonesia.

Karena itu ia berharap kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempetakan potensi pertanian. Jangan sampai bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, sehingga tidak berdampak baik buat petani, distribusikan bantuan sesuai potensi yang ada. "Jangan sampai menyebarkan bantuan, terutama alat dan mesin pertanian hanya menjadi hiasan rumah saja yang tidak dipergunakan dengan baik," tegas Ikram.

Juliadi/Yul

AgroGain®
BERLIMPAH KEBAIKAN

FMC | An Agricultural Sciences Company

- MENINGKATKAN IMUNITAS** (Icon: Shield with a star and a checkmark)
- OPTIMALKAN BUNGA DAN BUAH** (Icon: Flower with a plus sign)
- PANEN BERKUALITAS** (Icon: Orange with a plus sign)
- AKTIVASI HORMON** (Icon: Plant with a plus sign)



Mohammad Ilham (kiri, baju merah berompi) bersama petani dan rekan-rekan penyuluh

Panen perdana dilakukan warga Dusun Salubomban, Desa Pincara, Kecamatan Masamba setelah 17 tahun tidak melakukan aktifitas pertanian. Hal ini tidak lepas dari peran Penyuluh Pertanian dalam mendorong petani untuk kembali bangkit mengolah lahan pertanian.

Tidak pernah terbersit dalam benak para petani dusun Salubomban untuk bisa kembali bertani dan menikmati hasil jerih payah mereka. Pasalnya sudah 17 tahun warga meninggalkan lahan pertanian karena berbagai

alasan. Namun, di awal April 2022, mereka berhasil melakukan panen perdana.

Penyuluh Pertanian WKPP Desa Pincara, Muhammad Ilham, tak bisa dikesampingkan begitu saja. Dialah aktor dibalik suksesnya aktivitas budidaya padi di desa tersebut. Ia mampu memotivasi warga kembali "membangunkan" lahan sawahnya.

PPL WKPP Desa Pincara, Muhammad Ilham, tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petani di Desa Pincara, khususnya dusun

Salubomban.

"Syukur kepada Allah SWT, terima kasih kepada rekan-rekan penyuluh. Terima kasih kepada Kelompok Tani Salubomban Desa Pincara Kecamatan Masamba yang telah melalui banyak proses budidaya padi, sehingga hari ini telah panen perdana," kata Ilham.

Lahan Terbangkalai

Ilham membeberkan, 17 tahun lamanya lahan yang luasnya kurang lebih 30 ha menjadi lahan terbangkalai. Masyarakat desa tersebut beralasan tidak ada pengairan, padi kurang produksi, tidak ada alsintan, ada serangan hama, serta tidak ada benih unggul.

Meski begitu, dengan penuh semangat, Ilham berupaya memotivasi petani untuk memanfaatkan semua potensi yang masih ada. "Hari ini, dengan modal swadaya petani dan penyuluh, kita bisa buktikan hasil panen ubinan kita mencapai 5 kg atau 8 ton/ha. Alhamdulillah, sesuai harapan," tuturnya.

Ilham mengatakan, ini bukan seberapa banyak ilmu tentang cara bercocok tanam padi yang

benar, tetapi ini sedikit dari cara mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat tani. "Semoga berkah, sehat selalu, musim tanam berikutnya bisa bertambah luas tanam padi," katanya.

Pejabat Fungsional Dinas Pertanian Luwu Utara, Rustam memberikan apresiasi kepada Ilham. "Saya pribadi mengapresiasi kawan saya, Ilham, yang sukses memotivasi warga untuk kembali membangun lahan sawah di Dusun Salubomban Desa Pincara setelah 17 tahun rehat dari aktivitas budidaya padi," katanya saat menghadiri panen perdana di dusun tersebut.

Rustam mengaku senang dapat hadir di acara panen perdana tersebut. Ia berharap panen hari ini bisa menginspirasi warga lainnya untuk kembali menggarap sawah demi mewujudkan ketahanan pangan, minimal di tingkat rumah tangga. "Kamu adalah salah satu bukti bahwa Penyuluh Sahabat Petani. Sekaligus role model penyuluh pertanian yang dirindukan petani," puji Rustam pada Ilham. **Suriady/Herman/Yul**

Di Tangan Engkus, Beternak Kerbau Pandeglang Menggeliat

Sukses meningkatkan populasi ternak kerbau di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten Engkus Kusmana, S.TP, Penyuluh Pertanian Kecamatan Carita mewakili Kabupaten Pandeglang dalam Lomba Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi Banten tahun 2022.

"Tahun 2017 saya mulai melakukan pengawalan dan pendampingan dalam kegiatan Rencana Usaha Budidaya Ternak Kerbau secara intensif, untuk meningkatkan skala usaha peternak kerbau," kata Engkus, Senin (7/3).

Pria kelahiran Sumedang 4 Mei 1969 ini mengatakan, Kecamatan Carita merupakan kecamatan yang mempunyai potensi untuk pengembangan ternak kerbau. Namun umumnya ternak kerbau dipelihara sebagai usaha sampingan dari usaha padi, sehingga sistem produksinya dari tahun ke tahun terus menurun. Padahal kontribusi usaha ternak kerbau terhadap pendapatan baik petani/peternak maupun daerah juga cukup tinggi.

Prihatin dengan kondisi tersebut Engkus pun mengembangkan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak kerbau. Tepatnya di Kelompok Tani Harapan Mulya, Desa Sukarame yang menjadi binaannya. Ia yakin dengan upaya ini peningkatan populasi akan bisa tercapai secara maksimal.

Engkus kemudian melakukan pendekatan kepada petani ternak. Sosialisasi di lapangan dilakukan dengan gencar agar minat peternak untuk melakukan kawin suntik atau Inseminasi Buatan (IB) terhadap kerbau betina semakin tinggi.

Alhasil jika pada tahun 2017 jumlah populasi kerbau dikelompok hanya sebanyak 82 ekor, pada tahun 2021 sudah mencapai 239 ekor. Populasi terbanyak terjadi pada tahun 2019 yang meningkat sebanyak 157



ekor.

Peningkatan ini karena Engkus mempercepat interval kelahiran atau calving interval serta tidak terjadi *inbreeding* (dapat mengatur jarak beranak).

Kini pria yang mulai menjalani profesi sebagai penyuluh pada tahun 1993 bersama poktan binaannya telah menikmati manfaat teknologi IB. Ia menuturkan, dengan IB usaha ternak kerbau menjadi hemat biaya karena peternak tidak perlu lagi memelihara pejantan,

sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk indukan.

Selain itu, menghemat waktu. Sebab untuk mengawinkan kerbau peternak tidak perlu mencari pejantan. Mereka cukup menghubungi petugas Inseminator.

Keuntungan lainnya, terjadi perbaikan mutu genetic menjadi lebih cepat, berat lahir lebih tinggi dan kemungkinan pertumbuhan berat badan ternak lebih cepat karena dihasilkan dari perkawinan pejantan unggul. **Regi/Yul**

Nurhadi, Widyaiswara BBPP Ketindan Berbagi Ilmu Hidroponik melalui Youtube

Di tengah pandemi yang membuat kegiatan tatap muka dibatasi, setiap orang, khususnya para penyuluh dan widyaiswara harus kreatif. Seperti yang dilakukan Nunung Nurhadi, widyaiswara Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

Kecintaannyaterhadapdunia pertanian membawanya berbagi ilmu melalui video di youtube. Hasil karyanya tersebut disalurkan untuk mendukung pembelajaran yang menjadi tupoksinya yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pertanian. "Dengan cara ini saya berharap dapat menyumbangkan pengalaman untuk diambil ilmunya bagi seluruh masyarakat," katanya.

Penerima penghargaan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo tahun 2021, memulai kariernya sebagai widyaiswara tahun 2006. Melalui kanal youtube sederhana yang dimiliki, Nurhadi, sapaan akrabnya, mengerjakan videonya disela-sela kesibukan mengajar dan bercocok tanam melalui media hidroponik.

Kanal pribadi youtube "Nunung Nurhadi" saat ini memiliki 64.000 *subscriber* dan ditonton rata-rata 26.000 jam per bulan. Terbukti banyak komentar positif yang mengatakan informasi yang diberikan melalui vlog-vlognya bermanfaat dan dan berguna, terutama pada topik hidroponik mulai dari peracikan nutrisi AB mix sampai pengemasan produk hidroponik.

Tenaga Ahli di Timor Timur

Bahkan tahun 2013 ia didapuk sebagai tenaga ahli dalam proyek *Increase Rice Crop Production* (IRCP) di Timor Leste selama 3 bulan (Distrik Manatuto). Proyek ini merupakan kerjasama tiga negara yaitu Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA), Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste untuk peningkatan produksi padi di Timor Leste. Atas kinerjanya, pada tahun 2014 Nurhadi kembali dikirimkan ke Timor Leste dengan tugas yang sama selama 7 bulan.

Ada satu hal yang menarik dari pengalamannya selama di Timor Leste, Nurhadi mengabadikan melalui video sebagai *trigger* untuk meningkatkan motivasi penyuluh pertanian di Timor Leste. Adanya video tutorial penyuluh dan petani sebagai aktor utama, motivasi mereka pun meningkat untuk melaksanakan teknologi yang tengah didesiminasikan.

Bahkan di akhir kegiatan tersebut Menteri Pertanian Timor Leste yang saat itu dijabat Mariano Sabino memerintahkan jajarannya untuk menayangkan seluruh video tutorial yang telah disusun dalam televisi nasional Timor Leste. Hal



Nurhadi menerima penghargaan dari Menteri Pertanian

ini tentu menjadi kebanggaan penyuluh pertanian kala itu khususnya Penyuluh Pertanian Distrik Manatuto.

Padatahun2015,Nurhadikembali dipercaya Kementerian Pertanian sebagai tenaga ahli budidaya pertanian berkolaborasi dengan ahli budidaya peternakan dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu dalam Proyek Kerjasama Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kegiatan ini bertema Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil dan Menengah melalui Sistem Pertanian Terpadu.

Sebagai seorang widyaiswara, Nurhadi berharap apa yang dilakukannya dapat diikuti dengan lebih baik lagi oleh widyaiswara, dosen dan guru yang lainnya sehingga dapat lebih memanfaatkan secara luas ilmunya kepada masyarakat.

Menurutnya, hobi sebagai seorang youtuber dengan meng-upload video di media sosial melalui platform *youtube* adalah hal yang sangat efektif dan efisien. Sebab, secara otomatis

menghilangkan kegiatan *Training Need Analysis* (TNA) karena penonton secara otomatis memilih dan menonton materi yang dikehendaki untuk menjawab permasalahannya di lapangan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan pada kegiatan pembelajaran secara *offline*.

Atas kerja keras, kreativitas dan dedikasinya yang gigih, Nunung Nurhadi terpilih menerima apresiasi penghargaan terhadap insan pertanian lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang diselenggarakan pada 22 Desember 2021 lalu.

Nurhadi menuturkan, pada dasarnya secara pribadi dirinya merasakan bahwa masih sedikit yang telah diperbuat, dan tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan ini. Namun apapun itu, Nurhadi berharap apresiasi ini dapat menjadikan cambuk bagi dirinya untuk dapat berbuat lebih banyak lagi kedepannya, terutama untuk kemajuan pertanian di Indonesia. **Yeniarta/Yul**

TABLOID
SinarTani
PERTANIAN INDONESIA BARU

Now Available
ON GOOGLE PLAY



Ikuti kami di sosial media :



tabloidsinartani.com



@SinarTaniST



tabloidsinartani



SINTA TV

Tabloid
sinartani.com



Bantuan Kedelai untuk Pengrajin Tahu Tempe

Dukung pengrajin tahu/tempe dalam keberlangsungan usaha selama Ramadhan hingga Idul Fitri, Kementerian Pertanian bersama PT Fisindo Kusuma Sejahtera (FKS) Multi Agro dan Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) memberikan bantuan kedelai.

Menjaga ketersediaan stok kedelai selama Ramadhan hingga Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan PT Fisindo Kusuma Sejahtera (FKS) Multi Agro dan Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) memberikan bantuan 135 ton kedelai kepada pengrajin tahu/tempe secara serentak di 11 lokasi. Diantaranya DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Garut, Pamanukan, Subang, Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementan bekerjasama dengan AKINDO dan PT Fisindo Kusuma Sejahtera Multi Agro untuk memperlancar pendistribusian stok kedelai ke pengrajin tahu tempe dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Dengan begitu, kerjasama ini untuk mendekatkan stok dengan

konsumen, sehingga diharapkan pengrajin mampu mendapatkan kedelai dengan mudah dan harga tahu tempe selama bulan Ramadhan stabil.

"Kegiatan ini tentunya untuk memperlancar pendistribusian karena kita dekatkan kedelai dari petani dan pengrajin," kata SYL saat penyaluran kedelai bagi pengrajin tahu tempe guna mendukung ketersediaan pangan di Hari Besar Keagamaan Nasional 2022, di Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Jakarta, Jumat (8/4).

SYL menegaskan, upaya memfasilitasi ketersediaan bahan baku kedelai dengan konsumen ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya produksi pangan. Sasarannya adalah pengrajin tahu tempe. Bantuan berupa voucher atau keringanan harga dengan jumlah terbatas dan tidak terkait dengan program kedelai yang lain.



"Kalau barangnya banyak tentu saja kita berharap penyesuaian supply and demand dapat berjalan. Ada daerah surplus dan daerah defisit sehingga kami coba intervensi distribusinya sehingga stok terjaga disemua daerah. Daerah yang surplus kami intervensi untuk menyuplai daerah yang defisit sehingga saya minta antar penanggung jawab di masing-masing daerah untuk bersinergi," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP)

Suwandi mengatakan, kerjasama Kementan dengan Akindo dan FKS dalam penyediaan kedelai bagi pengrajin tahu tempe merupakan langkah kongkret Kementan dalam mendekatkan kedelai dengan pengguna.

Harga kedelai dalam negeri saat ini cukup tinggi dan sangat menjanjikan untuk usaha tani kedelai. Kementan juga berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri agar kebutuhan dalam negeri diharapkan mampu terpenuhi dari produksi sendiri. **Herman/Yul**

Pastikan Stok Beras, Ombudsman ke Indramayu

Kementerian Pertanian bersama tim Ombudsman mengunjungi Kabupaten Indramayu untuk monitoring panen dan penggilingan padi di Desa Mundakjaya, Kecamatan Cikedung, Selasa (6/4). Ini guna memastikan ketersediaan atau stok beras di tingkat produsen mampu memenuhi kebutuhan.

Kepala Keasistenan Utama III Bidang Pertanian dan Pangan Ombudsman, Triyoga Muhtar Habibi mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketersediaan pangan.

Sebagaimana Ombudsman melakukan kajian terkait dengan cadangan beras pemerintah. "Salah satu poin yang menjadi catatan adalah optimalisasi Permentan 9 tahun 2020 tentang Kostraling," ujar Yoga

Menurut Yoga dalam rangka menjaga harga beras sesuai dengan undang-undang Layanan Publik No 25 Tahun 2009 salah satu contoh barang publik yang perlu selalu dikontrol adalah komoditas beras. "Kita diamanahkan menjaga harga gabah, tentu kami mendukung Kementan dalam

konteks ini," katanya.

Yoga menilai, Kementan telah melaksanakan saran Ombudsman untuk selalu mendorong gabah yang dihasilkan petani dapat sesuai dengan kriteria Permendag 24 tahun 2020 yakni kadar air, tingkat derajat sosok patah dan sebagainya. "Kemudian dukungan sarana dan prasarana dan capaian itu sesuai dengan harapan Pemerintah selama ini," sebut Yoga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi yang mendampingi kunjungan Ombudsman tersebut mengatakan, jajaran lingkup Kementan telah turun ke lapangan untuk mengamankan ketersediaan pangan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. "Ini kami lakukan supaya pasokan betul-betul terjaga dengan baik dan harga bisa di peroleh yang baik kepada konsumen," katanya

Suwandi mengatakan, secara nasional, termasuk Jawa Barat ketersediaan beras lebih dari cukup, bahkan lebih surplus melimpah. Bahkan sudah 3 tahun ini Indonesia tidak ada impor beras oleh Bulog, sehingga diyakini ketersediaan beras cukup aman. **Yul**

Anggaran Kementan Direlokasi

Kementerian Pertanian berkomitmen akan meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan, meski sebagian anggarannya harus direalokasikan kembali.

Hal ini disampaikan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/4). "Kami sampaikan terimakasih atas arahan dan petunjuk serta masukan yang sangat kondusif dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Kami mohon maaf atas apa yang tidak berkenan, tapi ke depan kami akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam rapat RDP ini Komisi IV memberikan banyak catatan realokasi anggaran untuk semua Direktorat Jenderal dan Badan-badan yang ada. Salah satunya adalah realokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar dari kegiatan pemberdayaan petani milenial BPPSDMP menjadi kegiatan pengembangan UPPO pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dengan demikian, anggaran di Sekretariat Jenderal tahun

2022 sebesar Rp 1,5 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 97 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 2,2 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp 1,1 triliun, Ditjen PKH Rp 1,6 triliun, Ditjen Perkebunan Rp 1,1 triliun, Ditjen PSP 2,9 triliun, Balitbangtan Rp 1,1 triliun, BPPSDMP Rp 1 triliun, Badan Karantina Rp 1,7 triliun dan BKP Kementan Rp 321 miliar.

Disisi lain, kata Kasdi, Kementan terus mengupayakan pembaharuan data produksi dan luas lahan pada kawasan pengembangan produksi pertanian di setiap provinsi Indonesia. Bahkan, pembaharuannya dilakukan secara berkala serta menyajikannya secara mudah kepada masyarakat Indonesia.

"Yang berkaitan dengan data kami akan memperbaikinya secara cepat karena dinamika di dirjen cukup kencang dan itu tidak kami konsolidasikan lagi sehingga ada perbedaan, dimana revisi di dirjen tidak kami record," ujarnya. **Yul**



Lahan Terbatas, Muhajir Sukses Bertani Hidroponik

Hidroponik saat ini menjadi salah satu pilihan milenial untuk bertani. Salah satunya, Muhajir, petani muda asal Sampang, Madura yang bertani sayur hidroponik dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah.

Banyak alasan petani, terutama milenial memilih bertani hidroponik. Selain bisa dilakukan di lahan terbatas, efisiensi dalam waktu dan tenaga kerja juga menjadi salah satu alasan. Hal itu juga yang mendorong Muhajir, asal Sampang, Madura terjun ke pertanian hidroponik sejak 2017 lalu.

"Saya mencoba sistem pertanian yang modern yang canggih, efisiensi dalam waktu dan tenaga kerja, sehingga saya rasa hidroponik itulah jawabannya. Apalagi untuk mengajak anak muda lebih mudah dengan menawarkan sistem hidroponik dari pada pertanian yang konvensional," ungkap Muhajir.

Memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong berukuran 7 m x 15 m, Muhajir menggunakan sistem *Deep Flow Technique* (DFT) untuk menanam berbagai jenis sayuran mulai dari selada keriting hijau, pakcoy, kangkung, dan daun mint.

Selain DFT yang diterapkan, Muhajir mengatakan ada banyak sistem yang biasa digunakan dalam bertani hidroponik. Misalnya, sistem sumbu, yang sangat sederhana dan

menjadi pilihan para pemula serta ibu rumah tangga.

"Sistem sumbu menggunakan kain flanel yang digantung, media-nya berupa rockwool, selain itu ada media lain seperti arang sekam, serbuk kayu, dan pasir malang," paparnya.

Selain itu juga ada sistem *Nutrient Film Technique* (NFT) yang juga banyak digunakan petani hidroponik. Menurut Muhajir, setiap sistem yang digunakan dalam hidroponik memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung lokasi atau daerah penerapannya.

Seperti sistem DFT yang efektif untuk daerah yang kerap mengalami pemadaman listrik. Saat pompa mati akibat pemadaman listrik, masih ada sisa genangan air yang bisa digunakan tanaman untuk bertahan. "Untuk NFT saat pompa mati harus siap-siap menyalakan genset terutama untuk tanaman yang sudah masuk masa remaja atau dewasa," ujarnya.

Namun bila dilihat dari sayur yang dihasilkan, sistem NFT dapat menghasilkan sayur yang lebih baik dibandingkan DFT. Dengan



bibit, waktu, dan nutrisi yang sama, hasil sayur dengan sistem NFT lebih cepat pertumbuhannya dan bobotnya juga bisa meningkat 10-20 persen.

Kendala Berhidroponik

Muhajir mengatakan, kendala dalam bertani hidroponik sebenarnya tidak banyak. Untuk pemula biasanya kendala yang dirasakan adalah mahal investasi untuk membuat instalasi hidroponik.

Namun bagi Muhajir hal tersebut bisa diatasi dengan membuat instalasi yang sederhana dan menggunakan barang bekas. Selain itu bagi yang baru pertama bertani hidroponik, memasarkan produk juga menjadi salah satu kendala.

"Terkadang bagi pemula melihat

kebun yang sudah profesional dan sudah berjalan bertahun-tahun menjadi daya tarik. Mereka langsung mencoba skala besar tanpa tahu seperti apa nanti marketingnya, kemungkinan disana kendalanya jadi banyak yang gulung tikar, intinya dari segi pemasaran," tambahnya.

Harga jual sayuran hidroponik terbilang bagus. Misalnya untuk jenis sawi Rp 10 ribu/3 batang/lubang tanam. Untuk kangkung memiliki harga yang lebih merakyat dikisaran Rp 5 ribu. Muhajir mengaku saat ini kapasitas produksi sebesar 10 per hari.

"Setiap hari harus ada yang bisa dipanen supaya produksinya terus berlanjut, setiap minggu kita kondisikan 3-4 hari kita semai bibitnya," tambahnya.

Dalam memulai bertani hidroponik, selain menyiapkan instalasi, persiapan bibit juga perlu dilakukan. Muhajir menyarankan, penyemaian sebaiknya pagi hari, karena pada dasarnya benih itu akan pecah 1x24 jam.

Proses penyemaian juga sebaiknya dilakukan di ruang tertutup terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya benih yang sudah pecah tunas dipindahkan keluar agar terkena sinar matahari selama minimal 7-12 jam.

"Apabila sudah pecah saatnya sudah dikenalkan dengan lingkungan. Jadi harus dikenalkan dengan sinar matahari. Jika tidak, maka akan berakibat pertumbuhan benih yang kurang bagus, kalau mau aman ada atap fiber transparan atau plastik UV," ungkapnya.

Kemudian menurut Muhajir, pada umur 10 hari dilakukan perpindahan tanaman dalam tempat peremajaan. Dengan ketebalan media tanam 2-2,5 cm dan separuh medianya tergenang air dibagian bawah, namun jangan sampai semua akarnya tergenang.

Soleman/Herman/Yul

Trik Pemberian Nutrisi

Pemberian nutrisi menjadi bagian penting dalam bertani hidroponik. Karena itu Muhajir mengatakan, tergantung pada jenis tanamannya. Pemberian nutrisi biasanya dalam hitungan 7-14 hari dengan takaran tertentu.

Setelah di media peremajaan hingga 30 hari, tanaman dipindahkan ke media pendewasaan hingga panen. Bedanya menurut Muhajir, hanya jarak tanamnya saja.

Jadi ada dua tipe lubang jarak tanam. Pada peremajaan lebih rapat karena masih kecil. Sedangkan, kalau yang pembesaran jaraknya sudah harus minimal 20 cm.

"Tentunya nutrisinya juga dinaikkan sesuai kebutuhan sampai panen, biasanya 42-45 hari sudah bisa dipanen tidak boleh terlalu lama atau terlalu tua nanti malah berbunga," ungkapnya.

Untuk penggantian air,



Muhajir mengatakan, biasanya dilakukan setelah 2-3 kali panen. Caranya, dengan menguras dan membersihkan tendon atau tempat penampungan air.

Tidak kalah penting adalah memperhatikan PH airnya.

Standarnya di kisaran 5,6-6,5. Jika terlalu asam bisa menyebabkan pertumbuhan jamur. Sebaliknya apabila terlalu tinggi nutrisi yang diberikan tidak akan terserap sempurna oleh tanaman.

Soleman/Herman/Yul